



**ANALISIS  
ISU TERKINI  
DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA  
TRIWULAN II 2020**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**ANALISIS  
ISU TERKINI  
DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA  
TRIWULAN II 2020**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

©2020 Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Jl. Lingkar Selatan (Jl. Brawijaya) Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta  
Telepon: (+62274) 4342234  
Email: [bps3400@mailhost.bps.go.id](mailto:bps3400@mailhost.bps.go.id)  
Homepage: <http://yogyakarta.bps.go.id>

### Analisis Isu Terkini Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan II 2020

ISBN: 978-602-1392-96-6  
No. Publikasi: 34550.  
Katalog: 9101009.34  
Ukuran Buku: 17,6 x 25 cm  
Jumlah Halaman: viii + 42 Halaman

#### Naskah:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

#### Penyedia Data:

Bidang Statistik Distribusi  
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

#### Gambar Kulit:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

#### Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

#### Dicetak oleh:

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DIY, 2020

# Tim Penyusun

## Penanggung Jawab

Heru Margono

## Editor

Mainil Asni

## Penulis I

Mutijo

## Penulis II

Waluyo

## Pengolah Data

Mutijo

## Pengolah Data

Waluyo

## Desain Gambar Kulit

Mutijo

## Desain dan Tata Letak Layout

Mutijo



# Kata Pengantar

Analisis Isu Terkini Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan II-2020 merupakan publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menyajikan gambaran beberapa fenomena yang terjadi selama triwulan II-2020 atau periode sebelumnya yang mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi di triwulan II-2020. Publikasi ini membahas dua tema. Tema pertama tentang Perkembangan Indikator Makro Ekonomi sebagai *overview* pembangunan ekonomi makro di DIY. Indikator yang dibahas mencakup tren pertumbuhan ekonomi, perkembangan harga konsumen dan inflasi sebagai cerminan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat, perkembangan angka pengangguran, dan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Tema kedua tentang analisis dinamika pengangguran dan karakteristik penganggur di DIY. Fokus pembahasan di tema kedua ini adalah dinamika perkembangan tingkat pengangguran terbuka, pola perbedaan perkembangan TPT menurut wilayah dan jenis kelamin, dan gambaran mengenai karakteristik individu yang mencakup pendidikan, usia, status kawin, dan lainnya dari penduduk yang termasuk dalam kategori pengangguran terbuka, tingkat setengah penganggur, dan pekerja paruh waktu di wilayah DIY.

Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberi masukan dalam penyusunan publikasi ini. Semoga publikasi ini bermanfaat sebagai bahan rujukan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, Juni 2020

Kepala

Badan Pusat Statistik Provinsi  
Daerah Istimewa Yogyakarta



Dr. Heru Margono, M.Sc.



# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>
<b>TEMA 1</b>	
<b>Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta .....</b>	<b>1</b>
1. Tren Pertumbuhan Ekonomi 2015-2019 .....	3
2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2020 .....	8
3. Inflasi .....	13
4. Perkembangan Angka Pengangguran .....	14
5. Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan .....	17
<b>TEMA 2</b>	
<b>Analisis Dinamika Pengangguran dan Karakteristik Penganggur di Daerah Istimewa Yogyakarta .....</b>	<b>25</b>
1. Latar Belakang .....	27
2. Tujuan .....	28
3. Tinjauan Pustaka .....	29
4. Metode Analisis .....	30
5. Hasil dan Pembahasan .....	30



<https://yogyakarta.bps.go.id>

**TEMA 1**  
**PERKEMBANGAN**  
**INDIKATOR MAKRO EKONOMI**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

<https://yogyakartaops.yid>



# TEMA 1

## Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta

Penulis: Mutijo

Di era pemerintahan sekarang, indikator strategis yang digunakan untuk mengevaluasi pembangunan dan menjadi tolok ukur dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan mendatang di antaranya adalah inflasi, ekspor-impor, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan indeks pembangunan manusia (IPM). Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi dikatakan berkualitas bila mampu menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan membuka kesempatan kerja yang luas atau memperkecil angka pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga menjadi sasaran target dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan bila ternyata belum mampu menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata, baik kepada penduduk maupun wilayahnya. Demikian pula, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup baik bila belum mampu mendorong berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, sasaran dan program pembangunan seharusnya juga diiringi dengan target capaian pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan angka pengangguran.

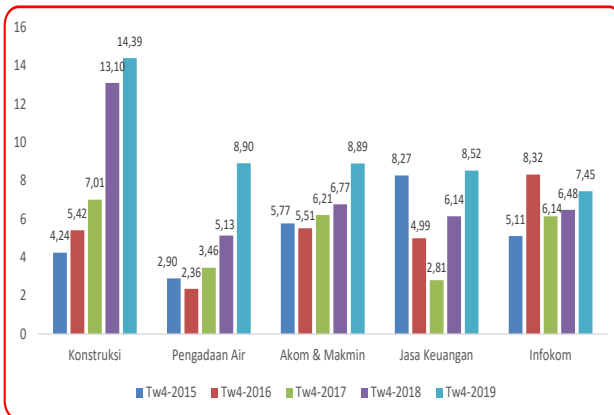
### 1. Tren Pertumbuhan Ekonomi 2015-2019

#### a. Trend Pertumbuhan Sektoral

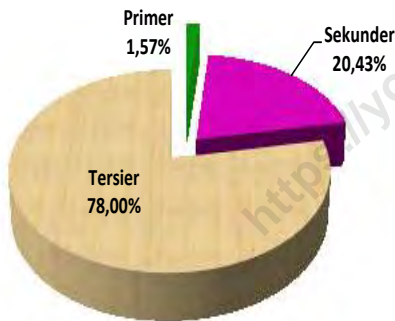
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama untuk merepresentasikan fenomena ekonomi makro suatu negara maupun wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga bermakna perkembangan kesejahteraan suatu negara atau wilayah, yang tercermin pada peningkatan output per kapita sehingga mendorong atau memberikan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa, atau dalam bahasa lain meningkatkan daya beli masyarakat.

Kinerja perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2019 yang diukur dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai 6,60 persen (*c-to-c*). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi bila

**Gambar 1.1.**  
**Pertumbuhan Ekonomi DIY (persen), 2015-2019**



**Gambar 1.2.**  
**Lima Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Tertinggi di 2019 (persen)**



dibanding dengan pertumbuhan ekonomi 2018 yang sebesar 6,20 persen (Gambar 1.1). Tren pertumbuhan selama lima tahun terakhir juga masih menunjukkan kecenderungan naik. Hal ini menggambarkan kondisi perekonomian DIY secara makro dari tahun ke tahun semakin membaik.

Ditinjau dari kinerja lapangan usaha dari seluruh sektor perekonomian, semua lapangan usaha tumbuh positif dengan pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha konstruksi, yaitu sebesar 14,39 persen. Selain konstruksi, lapangan usaha lain yang juga tumbuh tinggi adalah pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang yaitu sebesar 8,90 persen dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,89 persen (Gambar 1.2). Pertumbuhan konstruksi yang tinggi merupakan sumbangan dari aktivitas pembangunan sarana dan prasarana Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) di Kulon Progo. Penggerak pertumbuhan lapangan usaha konstruksi yang lain adalah

pembangunan infrastruktur jalan baik di jalan jalur lintas selatan (JJLS), seperti pembangunan jalan *underpass* di BIY sepanjang 1,3 km di Kecamatan Temon, Kulon Progo dan juga JJLS di wilayah Bantul dan Gunungkidul. Beberapa fasilitas umum seperti jembatan dan jalan di wilayah yang lain juga memberikan sumbangan yang nyata untuk pertumbuhan sektor konstruksi.

Terjadinya musim kemarau 2019 yang panjang menyebabkan adanya beberapa daerah mengalami kekeringan dan kekurangan air terutama di wilayah Kabupaten Gunungkidul dan sebagian Kabupaten Kulon Progo. Hal ini mendorong adanya peningkatan penyaluran air bersih bagi daerah-daerah tersebut.

Yogyakarta merupakan destinasi wisata utama di Pulau Jawa yang sepanjang tahun kepadatan kedatangannya hampir tidak pernah surut. Peningkatan aktivitas pariwisata dan kunjungan wisatawan tersebut menggerakkan sektor-sektor ekonomi penunjang pariwisata, di antaranya adalah aktivitas jasa akomodasi. Salah satu indikatornya adalah tingkat okupansi yang tidak pernah sepi. Aktivitas ekonomi lain yang menjadi unggulan pariwisata di DIY adalah wisata kuliner. Banyak wisata kuliner yang khas Yogyakarta yang tidak pernah sepi pengunjung, baik yang menyajikan makan besar maupun yang sifatnya jajanan makanan ringan tradisional.

Lapangan usaha konstruksi memang selama lima tahun terakhir tren peningkatannya paling pesat. Tetapi perlu diperhatikan bahwa peningkatan tersebut karena adanya mega proyek bandara baru yang terlihat bahwa mulai triwulan IV-2019 akselerasinya lebih landai karena sudah mendekati tahap akhir, meskipun penyempurnaannya masih akan terus berlangsung. Oleh karena itu untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi terutama di bidang infrastruktur, pemerintah pusat dan daerah masih memiliki rencana mega proyek yang lain, seperti jalan tol, kawasan aerotropolis untuk mendukung kawasan BIY, dan lain-lain.

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan selama tahun 2019 mengalami pertumbuhan paling rendah yaitu hanya 1,03 persen. Pertumbuhan tersebut merupakan yang terendah sejak 2015. Pertumbuhan pertanian yang rendah tersebut dipengaruhi oleh kelompok tanaman pangan, hortikultura tahunan, dan perikanan yang mengalami kontraksi dibanding kondisi tahun sebelumnya. Meskipun kelompok tanaman hortikultura semusim mengalami musim yang bagus sehingga tumbuh cukup tinggi namun karena kontribusinya sangat kecil dibanding tanaman pangan dan juga hortikultura tahunan yang mendominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan maka menjadikan pertumbuhan kategori pertanian rendah. Komoditas tanaman pangan meliputi padi dan palawija (jagung, ketela, kacang-kacangan). Tanaman hortikultura semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman berupa daun, bunga, buah, dan umbinya, yang berumur kurang dari satu tahun. Tanaman hortikultura tahunan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman berupa daun dan atau buah, yang berumur lebih dari satu tahun.

Pertumbuhan ekonomi (PDRB) secara makro merupakan agregasi dari aktivitas kategori-kategori atau lapangan usaha yang menyusunnya. Kontribusi yang beragam dari setiap kategori usaha mencirikan struktur perekonomian. Kontribusi terbesar dalam PDRB DIY 2019 adalah lapangan usaha industri pengolahan yaitu 12,85 persen. Disusul kemudian kategori konstruksi yaitu sebesar 11,11 persen; penyediaan akomodasi makan dan minum 10,35 persen; pertanian 9,37 persen; dan perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 8,47 persen. Struktur PDRB tidak banyak mengalami pergeseran dibanding tahun sebelumnya. Hal ini ditandai oleh komposisi lima besar pangsa kontribusinya yang sama.

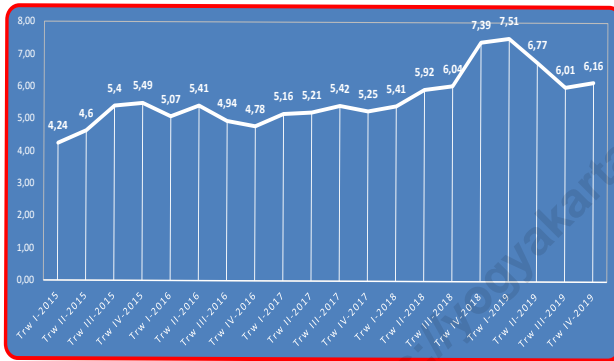
Selain laju pertumbuhan dan kontribusi, geliat perekonomian dapat dilihat

kategori-kategori usaha mana yang lebih berperan dalam menggerakkan roda perekonomian yaitu dari indikator andil pertumbuhan masing-masing lapangan usaha. Andil kategori konstruksi berada pada urutan tertinggi, yaitu 1,47 persen. Andil pertumbuhan terbesar berikutnya adalah kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 0,85 persen; informasi dan komunikasi sebesar 0,83 persen, industri pengolahan sebesar 0,73 persen, dan jasa pendidikan sebesar 0,58 persen.

Selain pertumbuhan sektoral seperti pada Gambar 1, kinerja ekonomi dapat dilihat dari andil pertumbuhan masing-masing lapangan usaha. Andil lapangan usaha konstruksi masih berada pada urutan tertinggi, yaitu 1,47 persen. Andil pertumbuhan terbesar berikutnya adalah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum

**Gambar 1.3.**

**Pertumbuhan Ekonomi DIY (y-on-y), 2015-2019**

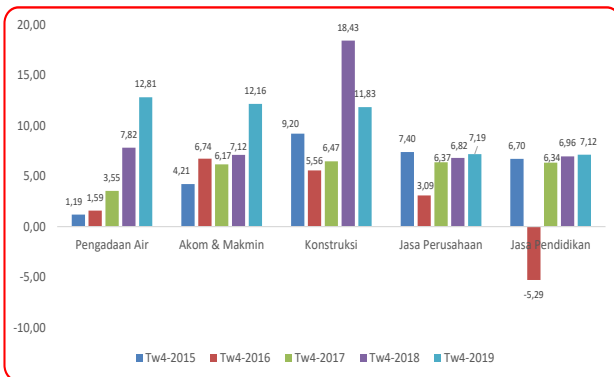


sebesar 0,85 persen; informasi dan komunikasi sebesar 0,83 persen, industri pengolahan sebesar 0,73 persen, dan jasa pendidikan sebesar 0,58 persen.

Kondisi perekonomian secara makro tahunan selain dapat dilihat kumulatifnya, seperti telah dibahas di atas, juga dapat dibandingkan perkembangannya untuk setiap triwulan. Pada Gambar 1.3, terlihat bahwa selama lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di triwulan I-2019, yaitu laju PDRB harga konstan triwulan I-2019 dibanding triwulan I-2018 (y-on-y). Pertumbuhannya menembus angka 7,51 persen. Hingga triwulan IV-2019 pun pertumbuhan ekonomi DIY masih tertinggi di Pulau Jawa meskipun hanya 6,16 persen. Selain DIY semua provinsi di Pulau Jawa tumbuh di bawah enam persen.

**Gambar 1.4.**

**Lima Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Tertinggi di 2019 (persen)**



menembus angka 7,51 persen. Hingga triwulan IV-2019 pun pertumbuhan ekonomi DIY masih tertinggi di Pulau Jawa meskipun hanya 6,16 persen. Selain DIY semua provinsi di Pulau Jawa tumbuh di bawah enam persen.

Secara tahunan, di triwulan IV-2019 dapat dilihat

sektor-sektor yang mengungkit pertumbuhan ekonomi secara total. Aktivitas pengadaan air menjadi paling menonjol pertumbuhannya yaitu mencapai 12,81 persen. Setelah itu, diikuti oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 12,16

persen, dan konstruksi sebesar 11,83 persen (Gambar 1.4). Selain ketiga lapangan usaha tersebut, yang menggeliat dan tumbuh di atas enam persen adalah jasa perusahaan, jasa pendidikan, pengadaan listrik dan gas, informasi dan komunikasi, dan jasa lainnya.

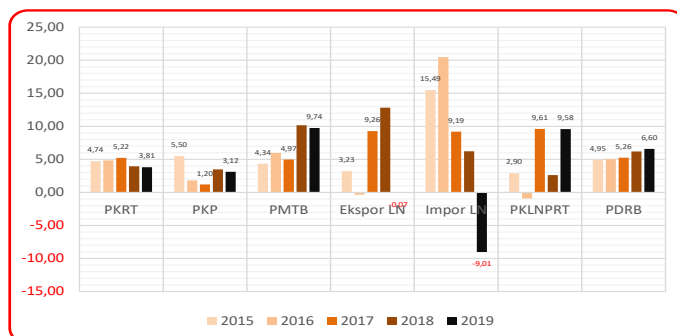
Pada tahun 2019, lapangan usaha pertanian dan pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi (*y-on-y*). Kondisi tersebut sangat dipengaruhi adanya pergeseran musim yang menyebabkan pergeseran musim tanam dan panen padi dan juga hortikultura. Di samping itu, hasil produksi di tahun 2018 juga sedikit lebih baik dibanding 2019. Demikian pula di lapangan usaha pertambangan dan penggalian kondisi 2018 jauh lebih tinggi sehingga tahun 2019 mengalami kontraksi. Hal ini dipengaruhi oleh aktivitas penggalian tanah urug untuk pembangunan bandara baru yang pengerjaannya sebagian besar ada di tahun 2018.

## b. Pertumbuhan menurut Penggunaan

Selain dari sisi produksi, PDRB dan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari sisi pengeluaran atau konsumsi. PDRB pengeluaran dibangun oleh 8 (delapan) komponen utama, yaitu: pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga swasta nonprofit, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor luar negeri, impor luar negeri, dan ekspor antardaerah netto. Menurut Eachern (2000: 149) untuk memahami pendekatan PDRB sisi pengeluaran, agregat sembilan komponen tersebut dikelompokkan menjadi empat komponen, yaitu: konsumsi, investasi, pengeluaran/pembelian pemerintah, dan ekspor netto. Pembahasan dalam analisis ini PDRB pengeluaran dikelompokkan menjadi tujuh komponen, yakni konsumsi rumah tangga, investasi (pembentukan modal tetap bruto), konsumsi pemerintah, ekspor luar negeri, impor luar negeri, ekspor antardaerah netto, dan lainnya. Hal ini disesuaikan dengan karakteristik khas perekonomian DIY.

Pertumbuhan komponen-komponen pengeluaran selama periode 2015-2019 terlihat menunjukkan arah perkembangan yang lebih baik. Adanya mega proyek bandara baru YIA, *underpass* Kentungan, dan juga jalan jalur lintas selatan telah merubah

**Gambar 1.5.**  
**Pertumbuhan Komponen Pengeluaran PDRB DIY,**  
**2015-2019 (persen)**





komposisi kontribusi dan pertumbuhan komponen PDRB penggunaan. Pertumbuhan komponen pembentukan modal tetap bruto yang pada tahun 2015 masih di bawah lima persen, di tahun 2018 melejit menjadi 10,17 persen dan menempati posisi tertinggi kedua. Di tahun 2019 dengan masih masifnya pengerjaan bandara YIA pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto mencapai 9,74 persen dan menjadi yang tertinggi di antara komponen yang lain. Sementara di urutan tertinggi kedua dan ketiga adalah pengeluaran konsumsi lembaga swasta nonprofit non rumah tangga dan pengeluaran konsumsi rumah tangga, masing-masing tumbuh sebesar 9,58 persen dan 3,81 persen.

Kinerja yang tinggi pembentukan modal tetap bruto selain dari laju pertumbuhannya juga dapat dilihat dari andil pertumbuhannya. Komponen ini juga mampu memberikan andil pertumbuhan tertinggi yaitu 2,71 persen dan ini sudah berlangsung dalam dua tahun terakhir. Tahun-tahun sebelumnya, atau dalam kondisi perekonomian yang normal tanpa ada mega proyek, andil pertumbuhan terbesar disumbangkan oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Ekspor luar negeri yang diharapkan menjadi andalan perdagangan DIY selama 2017-2018 telah menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Tetapi di 2019 mengalami kontraksi. Tidak hanya ekspor, kinerja impor luar negeri juga ikut melambat bahkan kontraksinya lebih dalam. Tampaknya perlambatan pertumbuhan ekonomi global dampaknya merambah juga pada iklim usaha dan perdagangan di DIY. Untungnya, perekonomian DIY dari sisi konsumsi masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga yang didukung oleh pergerakan besar investasi mampu mendorong ekonomi DIY tetap tumbuh mengesankan.

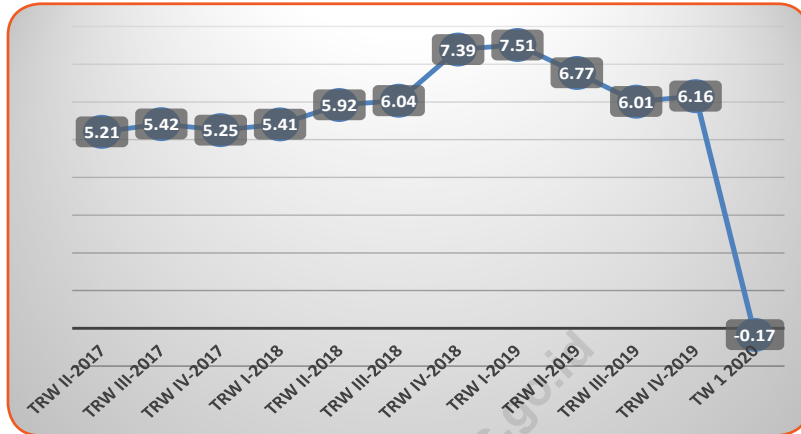
## 2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2020

### a. Pertumbuhan menurut Lapangan Usaha

Kinerja perekonomian DIY triwulan I-2020 dibanding triwulan I-2019 (*y-on-y*) mengalami kontraksi sebesar 0,17 persen, berbeda arah dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh cukup tinggi, yaitu 7,51 persen. Kontraksi tersebut dipicu oleh terjadinya penurunan kinerja di 11 kategori. Kontraksi tertinggi terjadi pada kategori Konstruksi yaitu sebesar 9,75 persen, disusul kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sebesar 8,92 persen. Curah hujan yang tidak menentu menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah di DIY dan juga mundurnya musim tanam padi sehingga panen raya belum terjadi di triwulan I-2020 ini. Akibat kemarau yang panjang tersebut banyak komoditas pertanian yang menurun produksinya, terutama komoditas padi dan palawija, serta beberapa komoditas hortikultura. Kontraksi berikutnya terjadi pada Jasa Perusahaan yaitu 7,48 persen, Pertambangan dan Penggalan sebesar 6,91 persen, dan Transportasi 3,23 persen.

Struktur perekonomian DIY triwulan I-2020 dapat dilihat dari kontribusi yang beragam dari setiap kategori usaha. Pangsa kontribusi terbesar adalah lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu 12,90 persen. Kontribusi terbesar berikutnya adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 11,35 persen; Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum 9,89 persen; Konstruksi sebesar 9,13 persen; dan Jasa Pendidikan sebesar

**Gambar 1.6.**  
**Pertumbuhan Ekonomi DIY Triwulan I-2020 (y-on-y)**



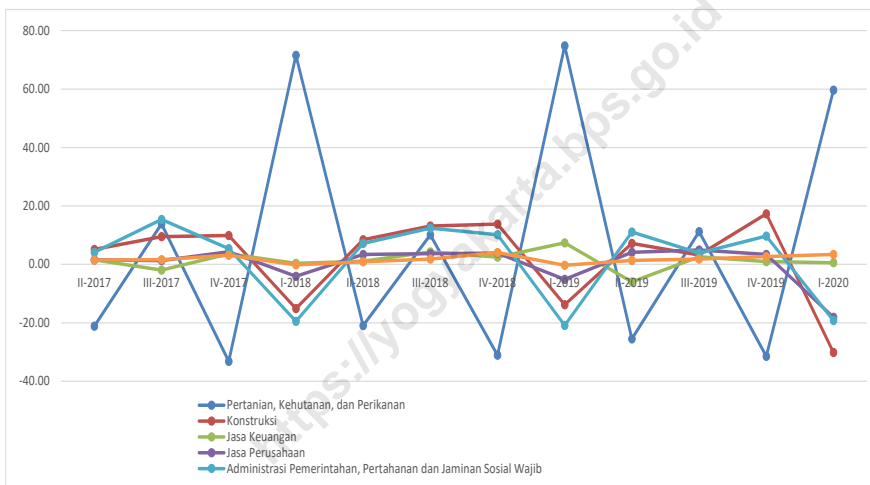
8,58 persen. Dibanding periode yang sama tahun sebelumnya struktur PDRB mengalami sedikit pergeseran karena urutan lima besar pangsa kontribusi sebelumnya adalah Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Kinerja perekonomian dapat dilihat dari andil pertumbuhan masing-masing lapangan usaha. Andil terbesar terhadap kontraksinya perekonomian DIY triwulan I 2020 adalah Konstruksi, yaitu minus 0,98 persen. Andil kontraksi terbesar berikutnya adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar minus 0,91. Andil kontraksi terbesar ketiga adalah Industri Pengolahan yaitu sebesar minus 0,19 persen; Transportasi minus 0,16 persen; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar minus 0,12 persen. Sementara kategori yang tumbuh positif sehingga mampu menghambat kontraksi tidak menjadi lebih dalam adalah Informasi dan Komunikasi yang memberikan andil pertumbuhan tertinggi, yaitu 1,22 persen, diikuti oleh Jasa Pendidikan sebesar 0,52 persen, dan Real Estat sebesar 0,31 persen.

Kondisi perekonomian DIY pada triwulan I-2020 terhadap triwulan IV-2019 (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 5,48 persen. Kondisi ini berlawanan arah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,80 persen. Kontraksi perekonomian triwulan I-2020 (q-to-q) diwarnai oleh pertumbuhan dan kontraksi kategori-kategori usaha dalam PDRB. Hanya tiga kategori yang mendukung pertumbuhan positif, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa Keuangan. Sementara 14 (empat belas) kategori yang lain mengalami kontraksi atau tumbuh negatif. Besarnya kontribusi ketiga kategori tersebut mampu mendongkrak pertumbuhan sehingga memberi peran besar dalam menjaga agregasi pertumbuhan PDRB meskipun secara total tetap mengalami kontraksi.

Kondisi perekonomian DIY pada triwulan I-2020 terhadap triwulan IV-2019 (*q-to-q*) mengalami kontraksi sebesar 5,48 persen. Kondisi ini berlawanan arah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,80 persen. Kontraksi perekonomian triwulan I-2020 (*q-to-q*) diwarnai oleh pertumbuhan dan kontraksi kategori-kategori usaha dalam PDRB. Hanya tiga kategori yang mendukung pertumbuhan positif, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa Keuangan. Sementara 14 (empat belas) kategori yang lain mengalami kontraksi atau tumbuh negatif. Besarnya kontribusi ketiga kategori tersebut mampu mendongkrak

**Gambar 1.7.**  
**Beberapa Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Tertinggi dan Terendah dalam PDRB Triwulan I-2020 (*q-to-q*)**



pertumbuhan sehingga memberi peran besar dalam menjaga agregasi pertumbuhan PDRB meskipun secara total tetap mengalami kontraksi.

Kategori Konstruksi mengalami kontraksi yang paling dalam, yaitu minus 30,43 persen disusul Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 19,22 persen. Pada awal tahun anggaran, kegiatan konstruksi yang bersumber dari APBN/APBD sebagian besar masih dalam proses perencanaan/lelang kecuali pekerjaan konstruksi yang bersifat multi years.

Industri Pengolahan mengalami kontraksi sebesar 3,92 persen. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan industri makanan dan minuman, industri furnitur, dan industri kulit. Sementara pertumbuhan pada industri tekstil dan pakaian jadi, industri mesin, dan industri kimia mampu menghambat penurunan pertumbuhan pada kategori industri pengolahan.

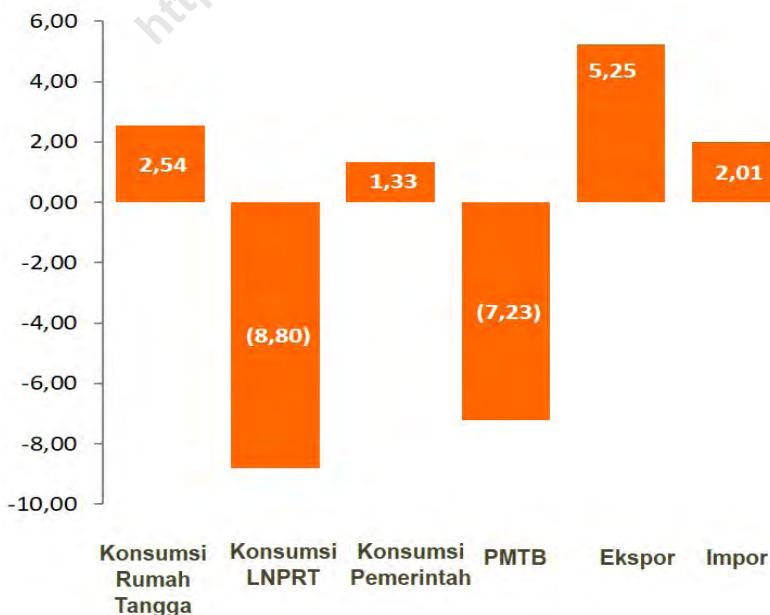
Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 60,38 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh pertumbuhan tanaman pangan, hortikultura, jasa pertanian dan perburuan, serta perikanan.

## b. Pertumbuhan menurut Pengeluaran

Dari sisi Pengeluaran, perekonomian DIY triwulan I-2020 terhadap triwulan I-2019 (*y-on-y*) mengalami kontraksi sebesar -0,17 persen. Pandemi Covid-19 yang mulai muncul di bulan Desember 2019 di Wuha Cina kemudian menyebar ke negara-negara di luar Cina sejak awal tahun 2020 telah menyebabkan penurunan berbagai kegiatan ekonomi dunia termasuk di DIY. Meskipun kasus Covid-19 di Indonesia baru ditemukan di awal Maret 2020, namun situasinya begitu cepat menggerogoti kebugaran ekonomi hampir semua negara di dunia. Dampak tersebut juga sangat dirasakan di DIY. Dibandingkan kondisi Triwulan I-2019, hampir seluruh komponen pengeluaran mengalami perlambatan. Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) mengalami kontraksi sebesar 7,23 persen, konsumsi lembaga swasta nonprofit (PKLNPRT) kontraksinya lebih dalam lagi yaitu 8,80 persen. Perlambatan pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah, yang masing-masing hanya tumbuh 2,54 persen dan 1,33 persen juga memberikan kontribusi terjadinya perlambatan ekonomi sehingga tumbuh negatif.

Struktur PDRB DIY menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan I-2020 tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, baik dibanding dengan triwulan IV-2019 maupun triwulan I-2019. Aktivitas ekonomi dari sisi pengeluaran masih didominasi oleh peran komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, yaitu sebesar 67,84 persen, atau lebih tinggi 2,95 poin dibanding triwulan IV-2019. Komponen kedua yang memberikan

**Gambar 1.8.**  
Pertumbuhan Ekonomi DIY Triwulan I-2020 menurut Pengeluaran  
(*y-on-y*)



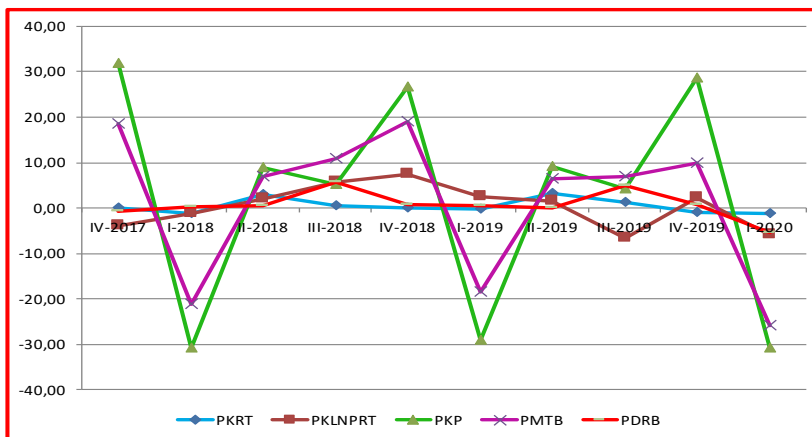
kontribusi cukup besar adalah pembentukan modal tetap bruto yaitu 30,58 persen, atau turun 8,59 poin dibanding triwulan IV-2019. Di triwulan pertama tahun ini, kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 14,32 persen, atau lebih rendah 5,54 poin dibanding triwulan sebelumnya.

Pangsa pertumbuhan komponen dalam pertumbuhan ekonomi triwulan I-2020 (y-on-y) lebih jelas dapat dilihat dari andil pertumbuhannya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga masih memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB DIY, yaitu 67,84 persen, sekaligus memberikan andil pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 1,45 persen. Sementara itu komponen pengeluaran lainnya memberikan andil di bawah 1 persen. PMTB yang mempunyai kontribusi terbesar kedua dan kontraksi pertumbuhannya cukup dalam memberikan andil yang cukup besar sehingga perekonomian mengalami kontraksi sebesar 0,17 persen.

Pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi DIY. Kondisi perekonomian DIY pada triwulan I-2020 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (*q-to-q*) mengalami kontraksi cukup dalam, yaitu -5,48 persen. Pembatasan aktivitas masyarakat dalam upaya mencegah penyebaran wabah Covid-19 berdampak pula kepada perlambatan perekonomian.

Di sisi pengeluaran hampir seluruh komponen-komponen pembentuknya mengalami kontraksi. Aktivitas dan nilai tambah ekonomi komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pengeluaran konsumsi lembaga non profit, pembentukan modal tetap bruto, ekspor dan impor luar negeri, serta net ekspor antar daerah mengalami kontraksi jika dibandingkan dengan triwulan IV-2019. Masing-masing komponen tersebut tumbuh berkisar antara -88,05 persen sampai dengan -1,24 persen. Komponen konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi sebesar 1,24 persen, ekspor luar negeri mengalami kontraksi 1,40 persen, konsumsi

**Gambar 1.9.**  
**Pertumbuhan Beberapa Komponen PDRB Triwulan (*q-to-q*), 2017-2020**

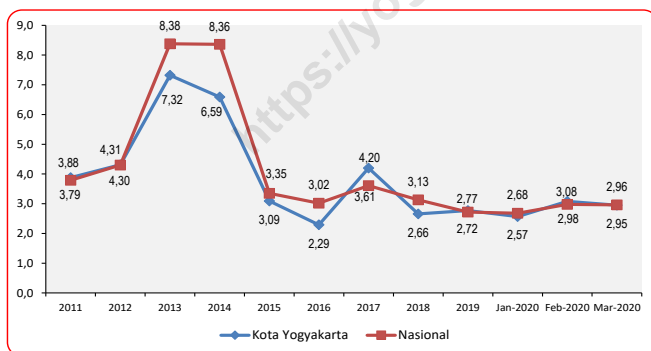


LNPRRT mengalami kontraksi sebesar 5,87 persen. Komponen impor luar negeri juga mengalami kontraksi sebesar 18,65 persen, demikian juga komponen net ekspor antardaerah yang berkontraksi sebesar 88,05 persen.

### 3. Inflasi

Pertumbuhan ekonomi tinggi membutuhkan dukungan stabilitas harga barang-barang dan jasa di tingkat konsumen. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan perkembangan nilai tambah seluruh aktivitas sektor ekonomi, sedangkan inflasi menggambarkan perkembangan perubahan harga barang-barang dan jasa di tingkat konsumen. Kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah pada dasarnya berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi. Salah satu kebijakan pemerintah yang strategis adalah mengendalikan tingkat inflasi agar tetap kondusif untuk dunia usaha dan juga bergairahnya daya beli masyarakat. Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan inflasi secara nasional tidak terlepas dari perkembangannya di tingkat daerah. Subbab ini membahas perkembangan inflasi secara deskriptif untuk Kota Yogyakarta sebagai representasi perkembangan harga di DIY dan juga membandingkan dengan inflasi di tingkat nasional pada periode waktu yang sama. Gambar 1.10 menyajikan perkembangan inflasi Yogyakarta dan Nasional selama kurun waktu 2011-2020.

**Gambar 1.10.**  
**Inflasi Kota Yogyakarta dan Nasional (y-on-y),  
2011-2020 (persen)**



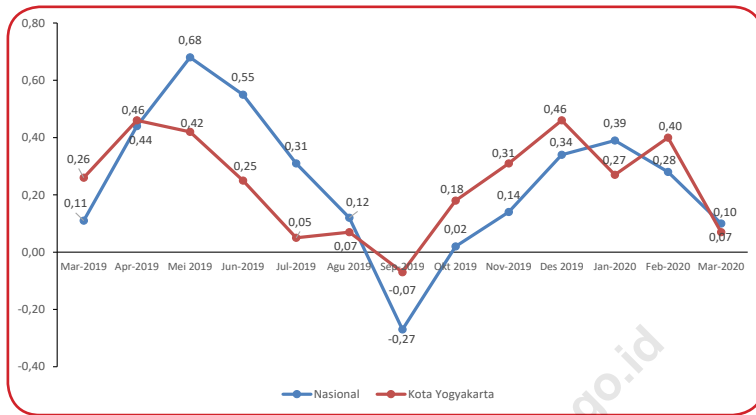
**Keterangan:**

- 2011-2019: IHK Desember tahun n terhadap IHK Desember tahun n-1
- Januari-Maret 2020: IHK bulan m tahun 2020 terhadap IHK bulan m tahun 2019

Secara umum inflasi Kota Yogyakarta relatif lebih rendah dibanding dengan nasional, kecuali di tahun 2017. Trend inflasi Kota Yogyakarta dan nasional menunjukkan pergerakan yang hampir seirama. Bahkan, selama tiga bulan terakhir (Januari-Maret 2020) absolut selisihnya berkisar antara 0,01 hingga 0,11 persen. Sementara bila dilihat perkembangan inflasi bulanan selama setahun terakhir, nasional maupun Kota Yogyakarta mengalami deflasi di bulan September 2019. Pada tingkat nasional, inflasi tertinggi tercatat pada bulan Mei 2019. Sementara di Kota Yogyakarta tertinggi di bulan April dan Desember 2019 (Gambar 1.11).

Selain secara tahun ke tahun dan bulanan, perubahan IHK atau inflasi menarik juga dilihat perkembangan selama triwulan I-2020 ini (Maret 2020 terhadap Desember

**Gambar 1.11.**  
**Inflasi Kota Yogyakarta dan Nasional (*m-to-m*),  
 Maret 2019-Maret 2020 (persen)**



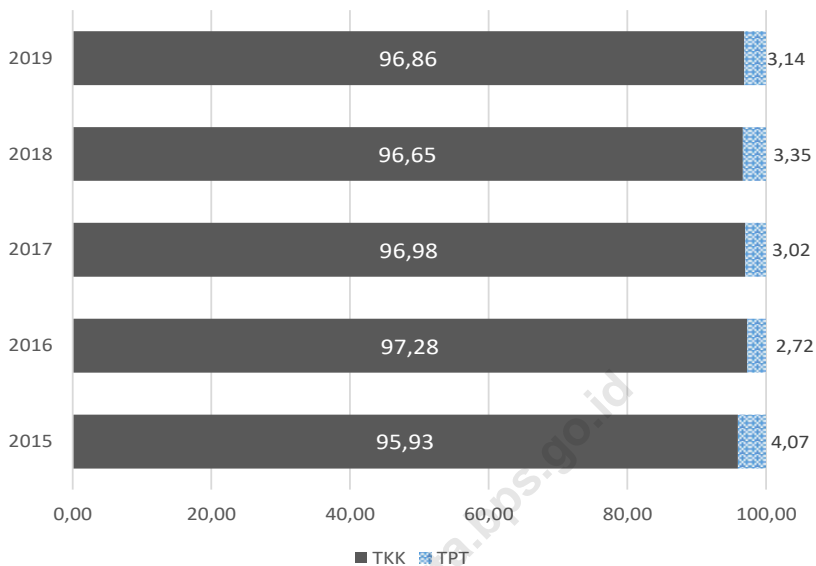
2019). Inflasi kalender Maret 2020 sebesar 0,74 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi adalah makanan, minuman, dan tembakau yaitu 3,15 persen. Selanjutnya diikuti oleh kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,60 persen dan pakaian dan alas kaki sebesar 0,61 persen. Pada triwulan I-2020 ini kelompok pengeluaran transportasi menjadi satu-satunya yang mengalami deflasi sebesar 1,75 persen. Bila dilihat inflasi tahun ke tahun transportasi juga mengalami deflasi di Maret ini. Deflasi kelompok pengeluaran transportasi di tahun kalender terjadi karena di Desember 2019 adalah bulan wisata dan liburan. Sementara itu, sejak diumumkan pertama kalinya wabah virus corona telah masuk di Indonesia di awal Maret dan terus berlanjut meningkatnya penyebaran virus tersebut hingga pertengahan Maret, pemerintah pada tanggal 15 Maret 2020 mengeluarkan kebijakan agar masyarakat bekerja di rumah, belajar dari rumah, beribadah di rumah, dan kurangi penggunaan transportasi umum telah mengakibatkan merosotnya aktivitas masyarakat di luar rumah. Hal ini yang menjadikan inflasi tahun ke tahun di bulan Maret mengalami deflasi.

Selain transportasi, semua kelompok pengeluaran mengalami inflasi dengan besaran antara 0,02 hingga 3,15 persen dalam penghitungan secara kalender. Inflasi terendah adalah kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dan yang tertinggi adalah makanan, minuman, dan tembakau.

#### 4. Perkembangan Angka Pengangguran

Sampai saat ini masalah ketenagakerjaan dan pengangguran masih menjadi perhatian utama bagi negara dan daerah. Keduanya merupakan satu kesatuan yang dapat menciptakan dualisme permasalahan yang dapat saja saling bertentangan antar satu dengan yang lainnya. Dualisme tersebut terjadi jika pemerintah tidak mampu dalam memanfaatkan potensi dan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan

**Gambar 1.12.**  
**TKK dan TPT Penduduk DIY (persen), 2015-2019**



dari dua permasalahan tersebut dengan baik. Namun jika pemerintah mampu mengidentifikasi potensi dan memanfaatkan kelebihan tenaga kerja yang ada maka dualisme permasalahan tidak akan terjadi. Bahkan, akan memberikan dampak yang positif dalam percepatan pembangunan. Demikian sebaliknya, jika pemerintah tidak mampu memanfaatkan maka akan menciptakan dampak negatif yaitu mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Tenaga kerja merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi suatu negara atau daerah. Namun dari sisi lain meningkatnya tenaga kerja justru seringkali menjadi persoalan ekonomi yang sulit untuk diselesaikan oleh pemerintah. Hal ini muncul karena kurang tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai sebagai dampak dari meningkatnya jumlah penduduk. Akibatnya, tenaga kerja yang ada tidak dapat terserap secara penuh sehingga terciptalah pengangguran.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta, jumlah penduduk usia bekerja atau usia 15 tahun ke atas di DIY pada Agustus 2019 mencapai 3,02 juta orang, mengalami peningkatan sebesar 1,15 persen dibanding keadaan pada Agustus 2018 yang sebanyak 2,99 juta orang atau bertambah 34,3 ribu orang. Bertambahnya penduduk usia bekerja tersebut juga diikuti oleh peningkatan jumlah angkatan kerja, yaitu bertambah sebanyak 12,2 ribu orang, atau terjadi peningkatan sebesar 0,56 persen. Jumlah penduduk yang bekerja juga mengalami peningkatan sebanyak 0,77 persen, yaitu dari 2,12 juta orang menjadi 2,13 juta orang.

Selain dari indikator tersebut, profil tenaga kerja dapat juga diamati dari penyerapan tenaga kerja di masing-masing sektor. Sampai dengan Agustus 2019,



sektor dengan kontribusi penyerapan tenaga kerja terbesar adalah pertanian sebesar 19,01 persen, perdagangan 18,96 persen, dan industri pengolahan 17,05 persen (BPS, Sakernas Agustus 2019).

Dua indikator yang juga krusial mencerminkan perkembangan ketenagakerjaan adalah tingkat kesempatan kerja (TKK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Dua indikator tersebut dibangun dari data-data yang sama. TKK merupakan rasio dari jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja, sedangkan TPT adalah rasio dari jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Oleh karena itu makna perkembangan dari dua indikator ini berlawanan arah. Selama tiga tahun terakhir, TKK turun dari 96,98 persen di tahun 2017 menjadi 96,65 persen di 2018 dan naik lagi menjadi 96,86 persen di 2019. Di sisi lain, TPT 2018 naik menjadi 3,35 persen dari 3,02 persen di 2017, bergerak turun lagi menjadi 3,14 persen di 2019.

Menurut klasifikasi wilayah perdesaan dan perkotaan, tingkat pengangguran di daerah perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. TPT perdesaan dan perkotaan tahun 2019 masing-masing sebesar 1,52 persen dan 3,78 persen. Baik perdesaan maupun perkotaan kondisinya lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Banyak faktor yang menyebabkan TPT perdesaan lebih rendah dibanding perkotaan. Di antaranya lapangan usaha di daerah perdesaan didominasi oleh pertanian dan penduduk di perdesaan lebih dominan orang-orang yang sudah tetap pekerjaannya yaitu di sektor pertanian. Penduduk usia kerja di perdesaan juga

**Tabel 1.1.**  
**TPT menurut Pendidikan, Daerah dan Jenis Kelamin, 2019 \*)**

<b>Pendidikan</b>	<b>Kota</b>	<b>Desa</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>Total</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. < SD	1,38	0,30	1.80	0.20	0.85
2. SD	2,29	0,73	2.09	0.91	1.56
3.SMP	3,59	1,05	2.97	2.46	2.75
4.SMA Umum	4,57	1,08	4.31	3.38	3.94
5. SMA Kejuruan	4,35	3,65	3.22	5.85	4.20
6. D I/II/III	2,47	12,36	2.48	4.80	3.87
7. Universitas	4,96	2.00	4.22	4.92	4.56
<b>Total</b>	<b>3.78</b>	<b>1.52</b>	<b>3.18</b>	<b>3.09</b>	<b>3.14</b>

Keterangan: \* Kondisi Agustus 2018

Sumber : BPS Provinsi DIY

lebih dominan merupakan kelompok bukan angkatan kerja yaitu mereka yang masih sekolah dan ibu rumah tangga. Bahkan, untuk musim-musim tertentu kelompok bukan angkatan kerja bisa masuk menjadi angkatan kerja karena menjadi pekerja keluarga di sawah/ladang. Selain itu, usia kerja yang sudah tamat sekolah cenderung melakukan urbanisasi untuk mencari kerja di kota. Sementara di perkotaan penduduknya kompleks karena mereka yang mencari kerja tentunya lebih banyak di perkotaan.

Disagregasi TPT menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan menjelaskan bahwa tingkat pengangguran cenderung tinggi untuk mereka yang berpendidikan SMA ke atas dan cenderung rendah untuk mereka yang berpendidikan rendah (SLTP ke bawah). Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain karena mereka yang tingkat pendidikan lebih rendah cenderung akan menerima pekerjaan apa saja yang penting bekerja. Sementara yang berpendidikan lebih tinggi cenderung memiliki pilihan, ketika kesempatan kerja tersedia, belum tentu yang berpendidikan SLTA ke atas akan menangkap kesempatan tersebut kalau dirasa tidak sesuai dengan level pendidikan dan keterampilannya. Oleh karena itu, pengangguran cenderung lebih banyak di kelompok pendidikan yang lebih tinggi. Sebagai catatan, bahwa Survei Angkatan Kerja Nasional dengan jumlah sampel yang besar dilakukan di bulan Agustus. Di bulan tersebut ada sebagian kelompok orang yang baru saja menyelesaikan pendidikannya, tetapi tidak berencana untuk melanjutkan ke level pendidikan di atasnya karena merasa sudah cukup atau karena alasan biaya atau karena alasan lainnya. TPT kondisi Agustus 2019 dibanding tahun sebelumnya untuk kelompok pendidikan SMK, DI/II/III, dan universitas terjadi penurunan. Bahkan untuk kelompok universitas turun drastis, dari 8,28 persen menjadi 4,56 persen. Penurunan ini memberikan kontribusi secara signifikan terhadap turunnya TPT DIY tahun 2019.

## 5. Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

### a. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu pengukuran kemiskinan absolut yang dilakukan BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kebutuhan dasar minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk nominal uang yang mencakup kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita sehari ditambah dengan kebutuhan non makanan seperti pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Nilai kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan. Penghitungan garis kemiskinan menggunakan data dasar hasil survei pengeluaran rumah tangga Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) yang dilakukan secara berkala. Seseorang dianggap miskin jika memiliki pengeluaran per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan yang telah ditentukan.

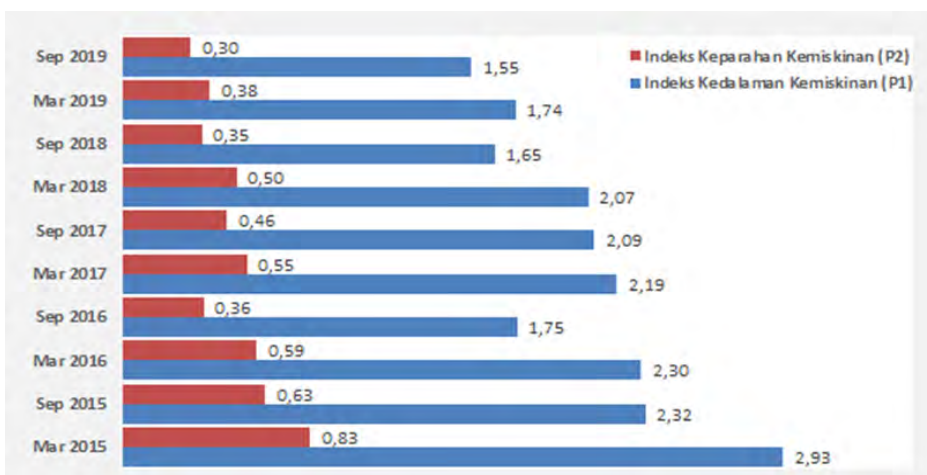
Garis kemiskinan yang merupakan nilai harga barang dan jasa kebutuhan dasar dalam perkembangan waktu mengalami perubahan seiring perubahan harga (inflasi/

deflasi) komoditas barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Faktor lain yang menyebabkan kenaikan garis kemiskinan adalah adanya perubahan pola konsumsi masyarakat dan juga perubahan jenis komoditas barang atau jasa yang dikonsumsi. Selama ini perkembangan garis kemiskinan selalu mengalami kenaikan. Secara absolut dalam lima tahun terakhir garis kemiskinan DIY juga meningkat. Garis kemiskinan DIY pada kondisi September 2015 ditetapkan sebesar Rp356.378 perkapita sebulan. Nilai ini meningkat menjadi Rp449.48 perkapita sebulan pada kondisi September 2019. Hal ini berarti garis kemiskinan secara nominal meningkat sebesar 29,27 persen. Gambaran secara umum di Indonesia garis kemiskinan di wilayah perkotaan selalu lebih tinggi dari garis kemiskinan perdesaan. Karakteristik lain, komposisi garis kemiskinan makanan lebih dominan dari garis kemiskinan nonmakanan. Berdasarkan kondisi data terakhir September 2019, untuk DIY proporsi garis kemiskinan makanan mencapai 71,86 persen, dan nonmakanan 28,14 persen.

Perkembangan persentase penduduk miskin ( $P_0$ ) di DIY selama kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019) terlihat semakin menurun, meskipun polanya sedikit berfluktuasi. Pada kondisi Maret 2015, proporsi penduduk miskin DIY tercatat sebesar 14,91 persen. Angka ini secara bertahap terus menurun hingga mencapai 11,44 persen pada kondisi September 2019. Angka 11,44 persen ini mengandung arti bahwa dari setiap 100 penduduk DIY terdapat 11 orang yang memiliki pengeluaran perkapita sebulan di bawah garis kemiskinan atau berstatus miskin. Selama periode 2015-2019 terjadi penurunan proporsi penduduk miskin sebesar 3,47 poin persen. Jumlah penduduk miskin DIY secara absolut turun sekitar 109,3 ribu orang, dari 550,23 ribu jiwa Maret 2015 menjadi 440,89 ribu jiwa kondisi September 2019. Secara rata-rata jumlah penduduk miskin di DIY turun 5,39 persen per tahun. Perkembangan tingkat kemiskinan di DIY memiliki pola yang hampir sama dengan kemiskinan pada level

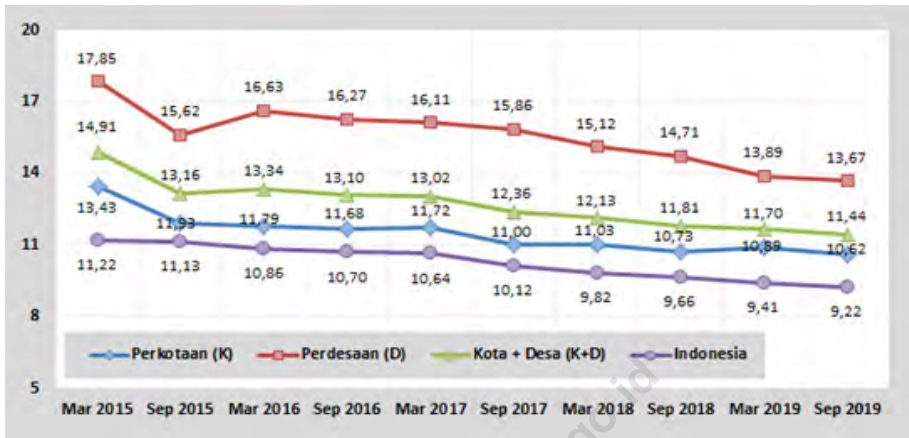
**Gambar 1.13.**

**Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan (P2) Kemiskinan DIY, 2015 – 2019**



Sumber: BPS DIY

**Gambar 1.14.**  
**Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Nasional, 2015 – 2019**



nasional. Namun demikian, secara persentase tingkat kemiskinan di DIY masih berada di atas level nasional. Pada kondisi September 2019 persentase penduduk miskin secara nasional sudah berada di bawah level 10 persen yakni 9,22 persen (Gambar 1.14). Hal ini menggambarkan bahwa melalui pendekatan ekonomi atau moneter level kemiskinan DIY ternyata lebih tinggi dibanding nasional.

Secara spasial, corak perekonomian antara perkotaan dan perdesaan tidaklah sama. Hal ini dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam yang dimiliki sehingga berdampak pada perbedaan tumbuhnya jenis pekerjaan dan lapangan usaha. Kualitas manusia dan ketersediaan infrastruktur juga memberikan pengaruh yang berbeda pada ragam aktivitas ekonomi suatu wilayah. Corak ekonomi wilayah juga dipengaruhi oleh pola hidup dan budaya masyarakat. Pola hidup yang paling menonjol adalah pola konsumsi, sementara budaya dan tradisi masyarakat mencakup upacara adat, upacara agama, dan kegiatan budaya lain yang masih dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat.

Pada umumnya, wilayah perkotaan menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan, sehingga jenis lapangan usaha yang tersedia juga lebih beragam. Sementara itu, daerah perdesaan lebih didominasi oleh aktivitas ekonomi yang berbasis pertanian, sehingga kesempatan kerja yang tersedia lebih terbatas dan lebih seragam pada aktivitas yang terkait dengan pertanian. Perbedaan karakteristik sosial ekonomi masyarakat perkotaan dan perdesaan sangat berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan antarwilayah beserta perkembangannya. Sampai dengan kondisi September 2019, persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Namun demikian, tren penurunan persentase penduduk miskin di pedesaan berjalan lebih cepat. Hal ini mengindikasikan bahwa program pengentasan kemiskinan yang dijalankan berhasil memacu pengurangan kemiskinan terutama di kawasan perdesaan. Persentase penduduk miskin di perdesaan pada kondisi Maret

2015 sebesar 17,85 persen dan turun menjadi 13,67 persen pada kondisi September 2019. Sementara, persentase penduduk miskin di perkotaan juga turun dari 13,43 persen pada Maret 2015 menjadi 10,62 persen pada September 2019.

Karakteristik kemiskinan perkotaan dan pedesaan tersebut secara kumulatif spasial juga menjadikan kemiskinan antarkabupaten dan kota juga berbeda-beda dari tahun ke tahun hingga 2019. Tiga kabupaten yang dominan pedesaan, Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul, memiliki kemiskinan lebih tinggi dibanding Sleman dan Kota Yogyakarta. Tingkat kemiskinan tertinggi di Kulon Progo dan diikuti Gunungkidul, masing-masing 17,4 persen dan 16,6 persen. Sementara Kota Yogyakarta dan Sleman tingkat kemiskinannya sebesar 6,8 persen dan 7,4 persen.

**Tabel 1.2.**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di DIY,**  
**2018 dan 2019 <sup>1)</sup>**

Kabupaten/Kota	2018		2019	
	Jumlah (ribu orang)	Persentase (%)	Jumlah ribu orang)	Persentase (%)
Kulon Progo	77,72	18,30	74,62	17,39
Bantul	134,84	13,43	131,15	12,92
Gunungkidul	125,76	17,12	123,08	16,61
Sleman	92,04	7,65	90,17	7,41
Yogyakarta	29,75	6,98	29,45	6,84
<b>DIY</b>	<b>460,10</b>	<b>12,13</b>	<b>448,47</b>	<b>11,70</b>

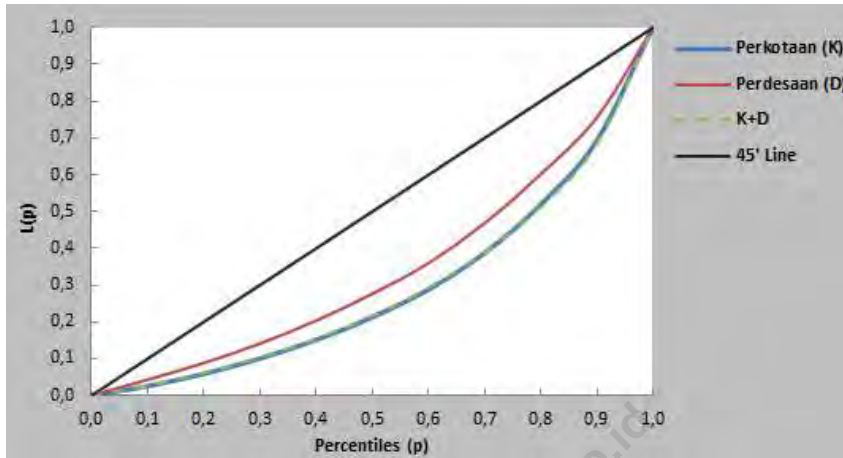
Keterangan: 1) Kondisi Maret

Sumber: diolah dari data dinamis TPT, BPS

## b. Ketimpangan Pendapatan

Beberapa kriteria atau tolok ukur yang lazim digunakan untuk menilai tingkat pemerataan distribusi pendapatan antarpenduduk di suatu wilayah adalah Kurva Lorenz, Rasio Gini, dan Kriteria Bank Dunia. Ketiga ukuran ini cukup mampu menjelaskan besaran ketimpangan secara kualitatif dan kuantitatif, sehingga tingkat perubahan dari tahun ke tahun dapat diamati.

Berdasarkan data terakhir yang dirilis BPS, yaitu Susenas Maret 2019, kondisi distribusi pendapatan antarpenduduk yang diproksi menggunakan pendekatan pengeluaran perkapita menunjukkan adanya gejala ketimpangan atau ketidakmerataan. Hal ini bisa dilihat dari bentuk Kurva Lorenz dalam Gambar 1.15. Kurva Lorenz DIY pada kondisi Maret 2019 masih jauh dari garis diagonal utama. Kondisi ini mencerminkan distribusi pendapatan di DIY masih timpang atau belum merata. Artinya, total pengeluaran penduduk pada kelompok berpendapatan tinggi masih mendominasi total pengeluaran penduduk DIY. Sebaliknya, andil pengeluaran penduduk pada kelompok berpendapatan terendah terhadap total pengeluaran masih rendah. Sebagai

**Gambar 1.15. Kurva Lorenz DIY Hasil Susenas Maret 2019**

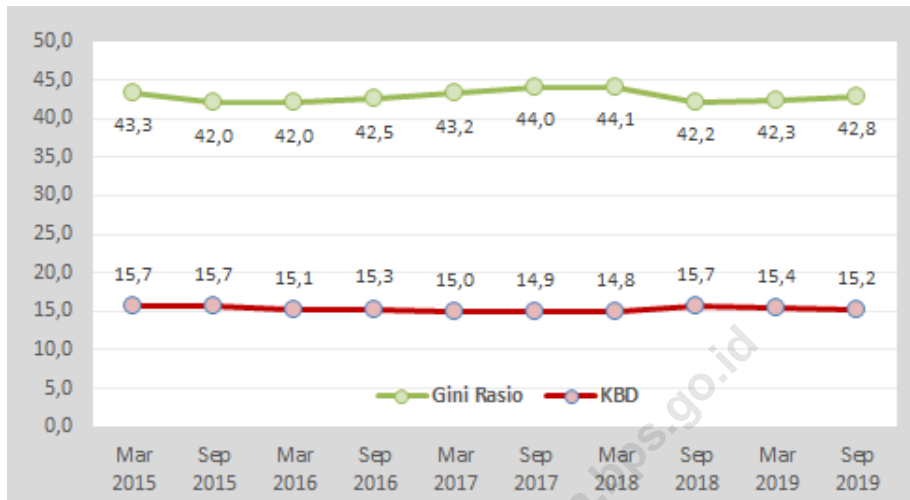
Sumber: BPS DIY

catatan, Kurva Lorenz hanya mampu menyimpulkan kondisi distribusi menggunakan pendekatan grafis dan belum mampu memberi kesimpulan kondisi distribusi secara kuantitatif. Secara relatif, kondisi distribusi pendapatan/pengeluaran di wilayah perkotaan cenderung lebih timpang dibandingkan dengan kondisi distribusi pendapatan di wilayah perdesaan. Atau dengan kata lain distribusi pendapatan perdesaan lebih merata. Hal ini terlihat dari posisi kurva Lorenz masing-masing wilayah.

Untuk melihat level ketimpangan/ketidakmerataan dalam distribusi secara kuantitatif dapat dilakukan menggunakan pendekatan ukuran Rasio Gini. Gambar 1.16 menyajikan tingkat pemerataan pendapatan yang diukur menggunakan Rasio Gini selama periode 2015-2019 dalam satuan persen. Perkembangan Rasio Gini selama periode 2015-2019 masih belum menunjukkan kondisi yang menggembirakan, yakni selalu di atas level 0,4. Artinya, kondisi distribusi pendapatan antarpenduduk masih belum merata dan tercatat dalam kategori ketimpangan moderat. Namun demikian, posisinya sudah dekat dengan batas kategori timpang. Rasio Gini DIY pada kondisi September 2019 menembus angka 0,43. Angka ini sedikit meningkat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai level 0,42. Secara umum, besarnya nilai Rasio Gini ini menggambarkan adanya ketimpangan pendapatan antarpenduduk yang cukup lebar. Kenaikan Rasio Gini menggambarkan ketimpangan yang semakin melebar, sebaliknya penurunan Rasio Gini menggambarkan ketimpangan pendapatan yang makin mengecil. Secara umum, ketimpangan pendapatan antarpenduduk di wilayah perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan wilayah perkotaan atau dengan kata lain distribusi pendapatan di perdesaan lebih merata. Hal ini terkait dengan karakteristik sosial ekonomi terutama lapangan usaha serta tingkat upah di wilayah perkotaan yang lebih heterogen mulai dari sektor formal sampai sektor informal.

Indikator lain untuk mendeteksi tingkat distribusi pendapatan adalah ukuran Kriteria Bank Dunia (KBD). Hasil hitungan ukuran ketimpangan KBD menjelaskan kondisi

**Gambar 1.16.**  
**Rasio Gini dan KBD (Persentase Pendapatan yang diterima oleh 40% Penduduk Berpendapatan Terendah) di DIY (persen) 2015–2019**



Sumber: BPS DIY

yang hampir sama dengan Rasio Gini. Persentase pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah terlihat semakin menurun dari 17,7 persen pada tahun 2015 menjadi hanya 15,2 persen pada tahun 2019. Demikian pula dengan 40 persen penduduk berpendapatan menengah, porsi distribusinya juga relatif stabil dan bahkan cenderung menurun. Sebaliknya, pada golongan 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi memiliki porsi distribusi total pendapatan yang semakin meningkat.

Fenomena kenaikan Rasio Gini dan penurunan andil persentase pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah menyiratkan bahwa kondisi distribusi pendapatan penduduk di DIY masih timpang atau belum merata. Meskipun demikian, berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh H.T Oshima ketimpangan pendapatan antarpenduduk di DIY masih dalam skala ketimpangan moderat (pada kisaran 30-50 persen). Berdasarkan skala ukuran kriteria Bank Dunia, ketimpangan pendapatan penduduk DIY juga masuk di skala moderat (range 12-17 persen).

Selama periode 2015–2019, pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah berkurang sebesar 0,29 poin persen. Kelompok 40 persen penduduk yang berpendapatan menengah menerima tambahan sebesar 1,69 poin. Sementara, andil kelompok 20 persen penduduk yang berpendapatan tertinggi juga turun sebesar 1,40 poin persen. Dengan kondisi ini seharusnya ketimpangan akan sedikit menurun. Namun, indikator Rasio Gini justru sedikit meningkat di bulan Maret 2019. Penyebabnya adalah kelompok penduduk yang berpendapatan menengah menerima tambahan porsi yang lebih besar dibanding kelompok yang berpendapatan

tertinggi. Secara umum, rasio antara proporsi pendapatan dari 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi dengan 40 persen penduduk berpendapatan terendah tercatat sebesar 3,2 kali lipat.

**Tabel 1.3.**  
**Indikator Ketimpangan Pendapatan Penduduk DIY, 2015 - 2019**

Indikator	Mar 2015	Mar 2016	Mar 2017	Mar 2018	Mar 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Andil Pendapatan					
a. 40% Penduduk Pendapatan Terendah (%)	15,65	15,08	14,96	14,83	15,36
b. 40% Penduduk Pendapatan Menengah (%)	34,07	37,13	34,94	34,38	35,76
c. 20% Penduduk Pendapatan Tertinggi (%)	50,28	47,79	50,12	50,79	48,88
2. Rasio Kuznet (c/a)	3,21	3,17	3,35	3,42	3,18
3. Rasio Gini	0,42	0,43	0,44	0,42	0,42

Sumber: BPS Provinsi DIY, diolah dari data SUSENAS bulan Maret





**TEMA 2**  
**ANALISIS DINAMIKA**  
**PENGANGGURAN DAN**  
**KARAKTERISTIK PENGANGGUR**  
**DI DIY**

<https://jogjakarta.bps.go.id/>



# TEMA 2

## ANALISIS DINAMIKA PENGANGGURAN DAN KARAKTERISTIK PENGANGGUR DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Penulis: Waluyo

### 1. Latar Belakang

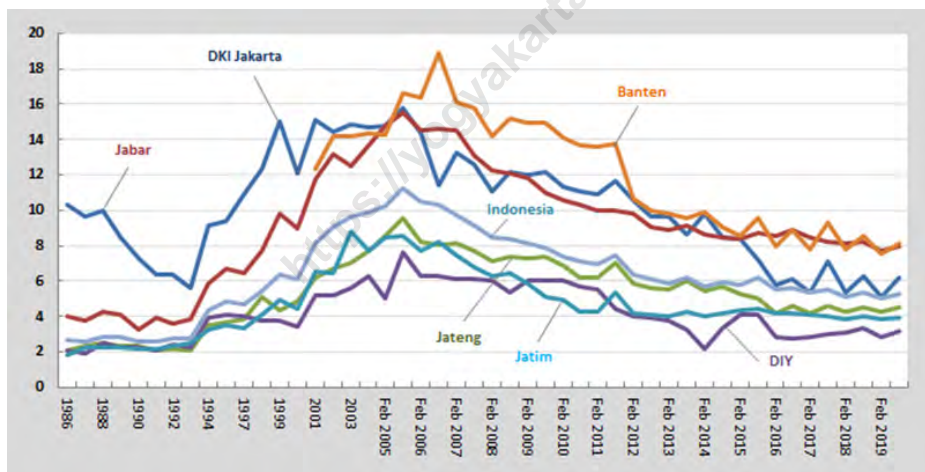
Salah satu tujuan pembangunan adalah tercapainya peningkatan pendapatan per kapita. Salah satu tema pokok yang sering mewarnai proses pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah adalah tingginya tingkat pengangguran. Pada level makro, jumlah penganggur yang besar menjadi beban bagi perekonomian suatu wilayah. Hal ini memiliki relasi yang kuat dengan capaian indikator makro lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Sementara, pada level mikro pengangguran adalah permasalahan yang sangat berat dan memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas kehidupan manusia. Bagi sebagian besar orang kehilangan pekerjaan selalu identik dengan menurunnya kualitas kehidupan karena berkurangnya sumber pendapatan untuk mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Bayang-bayang masuk dalam jerat kemiskinan akan tampak semakin nyata ketika seseorang kehilangan sumber pendapatan. Kehilangan pekerjaan juga akan memberi tekanan psikologis tidak hanya pada aspek ekonomi, namun juga aspek sosial, spiritual, kultural, dan lainnya. Tidak salah jika pengangguran sering menjadi tema utama dalam berbagai diskusi dan perdebatan oleh para politisi, kandidat kepala daerah, akademisi, elemen pemerintah, serikat buruh, dan pelaku usaha. Tujuannya tiada lain untuk mengidentifikasi dan merumuskan langkah serta strategi kebijakan yang tepat dalam mengurai dan menyelesaikan persoalan pengangguran maupun potensi dampak yang ditimbulkannya.

Indikator ketenagakerjaan yang biasa digunakan untuk mengukur fenomena pengangguran di suatu wilayah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Seiring dengan perkembangan waktu, TPT menjadi salah satu indikator strategis yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintahan berbagai tingkatan. Capaian indikator TPT selalu dievaluasi secara berkala untuk mengukur kualitas dari proses pembangunan sosial ekonomi yang telah dan sedang dijalankan, termasuk di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Perkembangan indikator TPT di DIY selama lebih dari tiga dekade terakhir (1986-2019) menunjukkan pola yang sangat berfluktuasi. Besarnya TPT bervariasi antara dua sampai delapan persen tergantung dari kondisi perekonomian sepanjang waktu (Gambar 1). Secara umum, perkembangan DIY TPT selama periode 1986-2019 memiliki pola yang

hampir sama dengan perkembangan TPT pada tingkat nasional maupun provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Namun demikian, secara level TPT di DIY tercatat selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan TPT nasional dan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Level TPT tertinggi selama tiga dekade terakhir masih terjadi di Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Kondisi ini tentu sangat menggembirakan bagi masyarakat DIY. Namun, perlu digali dan dikaji lebih mendalam apa yang menjadi sebab dan ada fenomena apa dibelakang rendahnya level TPT di DIY. Hal ini sangat penting karena dari sisi produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi di wilayah DIY masih relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Pulau Jawa. Ukurannya adalah indikator PDRB per tenaga kerja di DIY yang nilainya relatif lebih rendah dalam beberapa tahun terakhir. Kajian tersebut perlu memperhatikan aspek dinamika pengangguran secara luas yang mencakup perkembangan pengangguran terbuka dan karakteristiknya serta komposisi pekerja paruh waktu dan setengah penganggur beserta karakteristiknya.

**Gambar 2.1.**  
**Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Indonesia, 1986-2019 (Persen)**



Sumber: diolah dari data dinamis TPT, BPS

## 2. Tujuan

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penyusunan analisis dijabarkan sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran umum mengenai dinamika perkembangan tingkat pengangguran terbuka di wilayah DIY.
2. Memberikan gambaran mengenai pola perbedaan perkembangan TPT menurut wilayah dan jenis kelamin.
3. Memberikan gambaran mengenai karakteristik individu yang mencakup pendidikan, usia, status kawin, dan lainnya dari penduduk yang termasuk dalam kategori

pengangguran terbuka, tingkat setengah penganggur, dan pekerja paruh waktu di wilayah DIY berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada bulan Agustus 2019.

### 3. Tinjauan Pustaka

Konsep pengangguran secara umum mencakup penduduk berusia produktif yang tidak atau belum mendapatkan kesempatan bekerja karena berbagai alasan. Dinamika dalam pasar tenaga kerja menunjukkan bahwa peningkatan penawaran tenaga kerja akibat pertumbuhan penduduk tidak selalu diikuti peningkatan permintaan tenaga kerja secara seimbang. Salah satu penyebabnya adalah laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu wilayah tidak selalu diikuti oleh laju pertumbuhan penyerapan tenaga kerja secara proporsional (Tjiptoherijanto, 1998). Kelebihan penawaran tenaga kerja ini mendorong terjadinya pengangguran.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada awalnya mendefinisikan pengangguran terbuka sebagai penduduk berusia 15 tahun ke atas yang kondisinya tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Kegiatan mencari pekerjaan dapat dilakukan oleh mereka yang sama sekali belum pernah bekerja atau mereka yang pernah bekerja dan berhenti atau diberhentikan dari pekerjaannya. Upaya mencari pekerjaan tidak terbatas pada periode seminggu sebelum pencacahan, mereka yang berusaha mendapatkan pekerjaan lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap mencari pekerjaan. Definisi pengangguran terbuka mulai diperluas sejak tahun 2001 mengikuti rekomendasi dari International Labour Organization (ILO). Menurut konsep ILO, pengangguran terbuka terdiri dari mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau putus asa, dan sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Selain pengangguran terbuka, ada bagian dari angkatan kerja yang dikategorikan sebagai pekerja tak penuh. Kelompok ini mencakup mereka yang statusnya bekerja dengan jumlah jam kerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Pekerja tak penuh dibagi menjadi dua kelompok, yakni setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu. Kelompok setengah pengangguran mencakup mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. Sementara, pekerja paruh waktu (part time worker) mencakup mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) namun tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.

Istilah pengangguran dapat dikembangkan menurut beberapa kriteria, seperti pengangguran terdidik, pengangguran usia muda, dan lainnya. Pengangguran terdidik merepresentasikan tingkat pengangguran pada kelompok penduduk yang berpendidikan atau terdidik. Di negara yang sedang berkembang, kelompok terdidik biasa didefinisikan sebagai penduduk yang berpendidikan menengah ke atas. Pengangguran terdidik terjadi akibat adanya penyesuaian tenaga kerja yang baru menyelesaikan pendidikan. Salah satu faktor pendorongnya adalah struktur upah bergerak sangat lambat, khususnya pekerjaan formal pada sektor jasa yang merupakan lapangan kerja dominan

bagi pekerja terdidik (Tjiptoherijanto, 1998). Penduduk yang baru menyelesaikan pendidikan cenderung menunggu untuk mendapatkan jenis pekerjaan yang sesuai dengan upah yang diharapkan dibanding langsung menerima pekerjaan dengan upah/gaji yang rendah. Faktor pendorong yang lainnya adalah ketidakcocokan (mismatch) antara output pendidikan dan kesempatan kerja yang tersedia. Di beberapa negara yang sedang berkembang seperti India, Srilangka, Pakistan, dan Malaysia, karakteristik pengangguran terdidik cenderung berusia muda, tinggal di daerah perkotaan, dan masih ditanggung oleh keluarganya (Blaud dan Mayard, 1997).

#### 4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam pembahasan merupakan analisis statistik deskriptif dan pengujian hipotesis. Analisis deskriptif bersifat eksploratif yakni menggali informasi berdasarkan ringkasan statistik dan indikator ketenagakerjaan yang disajikan dalam bentuk tabel silang dan analisis grafik. Dalam analisis deskriptif, data yang sama bisa menghasilkan interpretasi dan kesimpulan yang berbeda tergantung dari kedalaman analisis. Kelebihan analisa deskriptif adalah mudah dipahami semua pihak tanpa membedakan latar belakang pembaca. Pengujian hipotesis dilakukan untuk melihat adanya perbedaan pola perkembangan TPT menurut wilayah dan jenis kelamin. Statistik uji yang digunakan adalah uji beda rata-rata sampel independent menggunakan uji t karena variasi populasinya tidak diketahui. Secara umum, hipotesis yang akan diuji adalah  $H_0: \mu_1 = \mu_2$  atau tidak ada perbedaan antara rata-rata TPT kelompok 1 dan kelompok 2 dan hipotesis alternatif  $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$  atau ada perbedaan antara rata-rata TPT kelompok 1 dan kelompok 2. Statistik ujinya adalah:

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)_0}{\sqrt{s_p^2/n_1 + s_p^2/n_2}}$$

$\bar{x}_1$  : rata-rata kelompok 1;  $\bar{x}_2$  : rata-rata kelompok 2;  $s_p$  : standar deviasi gabungan

Data yang digunakan dalam analisis merupakan data sekunder hasil Sakernas yang dilakukan secara berkala pada bulan Februari dan Agustus setiap tahun. Dinamika perkembangan TPT dikaji menggunakan hasil Sakernas periode 1986-2019 yang disesuaikan dengan ketersediaan data. Sementara, karakteristik individu dari indikator pengangguran dikaji berdasarkan hasil Sakernas pada kondisi bulan Agustus 2019. Hasil estimasi Sakernas bulan Agustus dapat disajikan sampai level kabupaten/kota.

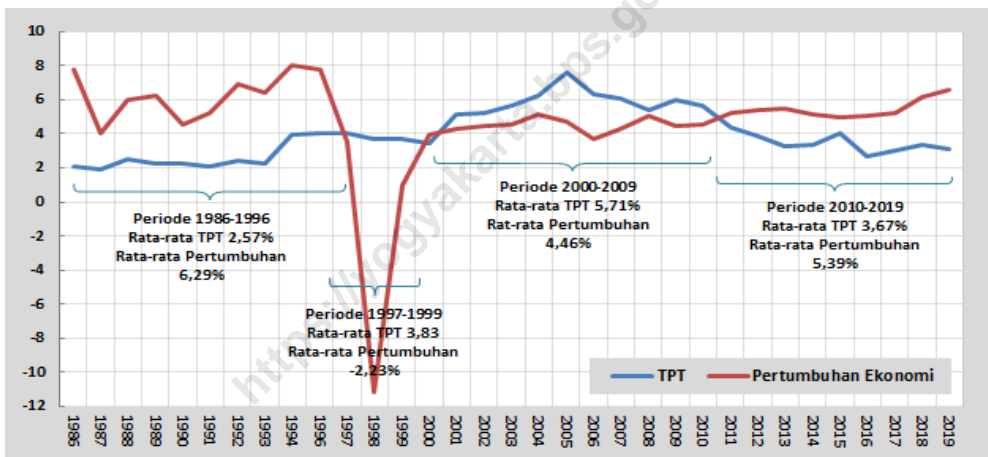
#### 5. Hasil dan Pembahasan

##### a. Dinamika Tingkat Pengangguran Terbuka DIY Periode 1986-2019

Pola perkembangan TPT sangat terkait dengan banyak faktor, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di DIY selama 1986-2019 sangat berfluktuasi dan hal ini sangat berpengaruh terhadap pola perkembangan

TPT (Gambar 2). Secara umum, pola pertumbuhan ekonomi dan TPT selama 1986-2019 dapat dibagi menjadi empat periode. Periode pertama adalah tahun 1986-1996. Selama masa ini, perekonomian sedang mencapai masa keemasan yang ditandai oleh rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ini mampu mendorong terciptanya banyak kesempatan kerja baru, sehingga rata-rata TPT selama periode ini sangat rendah yakni sebesar 2,5 persen. Periode kedua adalah masa krisis ekonomi, yakni tahun 1997-1999. Selama masa ini, kondisi perekonomian nasional dan regional DIY sangat terpuruk. Hal ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif hingga 11,2 persen pada tahun 1998. Mulai dari masa ini, TPT di DIY tercatat semakin meningkat dengan rata-rata 3,83 persen.

**Gambar 2.2.**  
**Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Indonesia, 1986-2019 (Persen)**



Sumber: diolah dari data dinamis TPT dan data pertumbuhan ekonomi DIY, BPS

Periode ketiga adalah tahun 2000-2009 atau masa pemulihan pasca krisis ekonomi. Selama masa ini, pengaruh krisis ekonomi secara bertahap mulai pulih yang ditandai oleh membaiknya fundamental perekonomian nasional seperti nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar yang mulai menguat, laju inflasi yang menurun, dan cadangan devisa yang bertambah secara signifikan. Namun demikian, di penghujung tahun 2005 nilai tukar rupiah kembali melemah dan terjadi gejolak kenaikan harga bahan bakar minyak selama dua kali. Kondisi ini diperparah oleh dampak gempa bumi yang melanda sebagian besar wilayah DIY pada pertengahan tahun 2006 serta krisis keuangan yang melanda beberapa negara tujuan utama ekspor adal DIY yakni di Eropa dan Amerika Serikat mulai tahun 2008. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap capaian pertumbuhan ekonomi DIY yang rata-rata tumbuh 4,46 persen per tahun selama 2000-2009. Aspek ketenagakerjaan, khususnya pengangguran terbuka juga terdampak oleh kondisi perekonomian makro sehingga rata-rata TPT selama periode 2000-2009



meningkat menjadi 5,71 persen. Level TPT tertinggi terjadi pada tahun 2005 sebesar 7,59 persen.

Periode keempat adalah tahun 2010-2019. Selama masa ini kondisi perekonomian secara makro mulai stabil dan semakin menguat dengan pertumbuhan di atas 5 persen. Rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun selama 2010-2019 mencapai 5,39 persen. Bahkan, dalam dua tahun terakhir (2018-2019) laju pertumbuhan ekonomi DIY semakin mantap di atas 6,2 persen yang didorong oleh aktivitas investasi khususnya pembangunan bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kabupaten Kulon Progo. Menguatnya perekonomian regional memberi dampak yang sangat signifikan terhadap penurunan level TPT di DIY. Rata-rata TPT DIY selama 2010-2019 tercatat sebesar 3,67 persen dan secara khusus TPT pada kondisi Agustus 2019 tercatat sebesar 3,14 persen.

## **b. Pola Perkembangan TPT DIY menurut Wilayah dan Jenis Kelamin**

Perkembangan TPT dapat dianalisis menurut karakteristik wilayah dan jenis kelamin. Perkembangan TPT menurut wilayah perkotaan dan perdesaan di DIY selama 2005-2019 terlihat berfluktuasi dan memiliki pola yang searah (Gambar 3). Secara umum, level TPT di wilayah perkotaan terlihat selalu lebih tinggi dibandingkan dengan TPT perdesaan. Dalam tiga tahun terakhir, level TPT perkotaan bervariasi antara 3,5-4 persen. Sementara, TPT di wilayah perdesaan bervariasi antara 1-1,7 persen. Berdasarkan hasil pengujian beda rata-rata menggunakan uji t diperoleh nilai t-stat sebesar 6,88 dan nilai ini signifikan pada taraf 0,01 (Tabel 1). Keputusan dari pengujian ini adalah menolak hipotesis nol dan kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang nyata antara TPT perkotaan dan perdesaan di wilayah DIY selama 2005-2019.

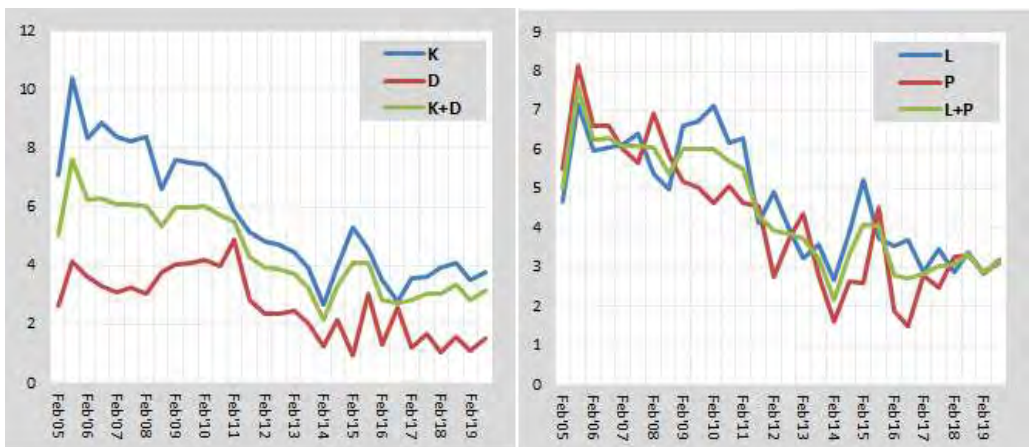
Perbedaan level TPT antarwilayah ini dipengaruhi oleh karakteristik kesempatan kerja yang tersedia di masing-masing wilayah serta karakteristik angkatan kerja terutama yang berusia muda, baru menyelesaikan pendidikan, dan baru pertama masuk masuk dalam pasar tenaga kerja sebagai pencari kerja. Di sebagian besar negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia terjadi fenomena ekonomi dua sektor (dual economic). Sektor yang berbasis pertanian tradisional di wilayah perdesaan berjalan bersama-sama dengan sektor modern yang berbasis manufaktur dan jasa di wilayah perkotaan. Konsekuensinya adalah karakteristik kesempatan kerja di wilayah perkotaan lebih majemuk atau heterogen baik pada sektor formal maupun informal. Sementara, kesempatan kerja di wilayah perdesaan lebih homogen pada lapangan usaha yang berbasis pertanian atau sektor primer. Jumlah kesempatan kerja yang tersedia di perkotaan juga lebih banyak, karena pembangunan ekonomi yang telah dan sedang dijalankan lebih berorientasi di kawasan perkotaan. Lapangan usaha pada sektor sekunder dan sektor tersier pada umumnya terdapat di wilayah perkotaan. Tingkat upah pekerja yang ditawarkan di wilayah perkotaan secara relatif juga lebih tinggi dari tingkat upah di perdesaan. Semua kondisi tersebut berpengaruh terhadap proses migrasi angkatan kerja dari wilayah perdesaan menuju ke wilayah perkotaan karena di perdesaan terjadi kelebihan suplai tenaga kerja. Proses migrasi juga didorong oleh kualitas infrastruktur perkotaan yang relatif lebih baik dari perdesaan. Namun demikian,

tidak semua angkatan kerja yang ada di wilayah perkotaan mampu terserap dalam pasar tenaga kerja formal di wilayah perkotaan. Sebagian dari angkatan kerja terpaksa menunggu untuk memperoleh kesempatan bekerja dan untuk sementara masuk dalam kelompok pengangguran. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya terpaksa bekerja di sektor informal perkotaan karena tuntutan untuk hidup. Hal ini menjadi salah satu penjasar tingginya level TPT perkotaan dibandingkan dengan TPT perdesaan.

Karakteristik angkatan kerja yang baru masuk dalam pasar tenaga kerja di wilayah perkotaan cenderung lebih selektif dalam memilih jenis pekerjaan formal yang sesuai dengan jenjang pendidikan dan jurusan serta tingkat upah yang diharapkan. Sikap selektif ini berpengaruh terhadap lamanya waktu menunggu untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Hal ini mendorong tingginya TPT pada kelompok angkatan kerja baru di wilayah perkotaan. Sementara, angkatan kerja baru di wilayah perdesaan yang menginginkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan tingkat upah yang diharapkan akan melakukan migrasi ke wilayah perkotaan. Bagi mereka yang tidak bermigrasi, mereka akan memilih untuk bekerja pada lapangan usaha yang tersedia di wilayah perdesaan termasuk pada sektor informal untuk sementara sambil menunggu kesempatan kerja yang sesuai dengan keinginannya. Bahkan, tidak sedikit di antara mereka yang terpaksa bekerja dengan jumlah jam kerja yang sangat sedikit dan berstatus sebagai pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar. Kondisi ini cukup berpengaruh terhadap rendahnya TPT di kawasan perdesaan dibandingkan dengan TPT perkotaan.

Perkembangan TPT DIY menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki pola yang hampir searah dan terlihat lebih dinamis. Pada beberapa titik periode, TPT penduduk laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Sebaliknya, tidak sedikit periode TPT laki-laki lebih rendah dari perempuan. Pengujian beda rata-rata antara TPT laki-laki dan perempuan di DIY selama periode 1995-2019 menghasilkan nilai t-statistik sebesar 1,13.

**Gambar 2.3.**  
**Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Wilayah dan Jenis Kelamin di DIY, 1995-2019 (Persen)**



Sumber: diolah dari data dinamis TPT DIY, BPS

**Tabel 2.1.**  
**Hasil Tes Uji Beda Rata-rata TPT menurut Wilayah dan Jenis Kelamin di DIY, 1995-2009**

Variabel	Group	Mean	Std. Dev.	Std. Error Mean	t-test for Equality of Means				
					t-Stat	df	Sig. (2-tailed)	Mean Dif.	Std. Error Dif.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Wilayah	Perkotaan	5,67	2,12	0,39	6,88	58	0,00***	3,02	0,44
	Perdesaan	2,65	1,13	0,21					
Jenis Kelamin	Laki-laki	4,69	1,46	0,27	1,13	58	0,26	0,47	0,41
	Perempuan	4,23	1,72	0,31					

Catatan: \*\*\* signifikan pada taraf 0,01

Nilai t-statistik ini tidak signifikan pada taraf 10 persen ( $\alpha=0,1$ ). Keputusan yang diambil berdasarkan hasil pengujian adalah menerima hipotesis nol atau adalah tidak cukup bukti untuk menyimpulkan adanya perbedaan rata-rata TPT laki-laki dan perempuan di DIY. Kesimpulannya adalah tidak ada kecenderungan yang berbeda antara level TPT laki-laki dan perempuan di wilayah DIY selama periode 2005-2019.

Secara proporsional tidak ada perbedaan yang nyata antara level TPT laki-laki dan perempuan, namun secara absolut jumlah penganggur laki-laki lebih banyak dari perempuan. Pada kondisi Agustus 2019, jumlah penganggur laki-laki sebanyak 38,6 ribu jiwa (TPT 3,18 persen) dan penganggur perempuan sebanyak 30,6 ribu jiwa (TPT 3,09 persen). Perbedaan absolut ini dipengaruhi oleh gap tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) antara laki-laki dan perempuan yang masih sangat lebar. TPAK laki-laki pada kondisi Agustus 2019 mencapai 81,95 persen, sementara TPAK perempuan hanya sebesar 64,28 persen sehingga gapnya adalah 17,67 persen. Gap atau ketimpangan partisipasi dalam pasar tenaga kerja yang cukup besar sangat dipengaruhi oleh pandangan yang berlaku dalam masyarakat DIY bahwa mencari nafkah menjadi tanggung jawab utama kaum laki-laki. Sementara, kaum perempuan memiliki tanggung jawab utama melakukan pekerjaan domestik mengurus rumah tangga dan partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja sifatnya hanya untuk membantu ekonomi keluarga.

### c. Karakteristik Pengangguran Terbuka

Karakteristik pengangguran terbuka di wilayah DIY berdasarkan hasil Sakernas pada kondisi Agustus 2019 diringkas dalam Tabel 2. Komposisi pengangguran terbuka berdasarkan kategorinya didominasi oleh mereka yang statusnya mencari pekerjaan dengan proporsi sebesar 83,13 persen. Sebagian besar dari kelompok ini merupakan

angkatan kerja usia muda dan baru masuk dalam pasat tenaga kerja. Komposisi yang mempersiapkan usaha sebesar 7,92 persen, mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan tapi belum mulai bekerja sebesar 4,18 persen, dan mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan atau sudah putus asa (discouraged workers) sebesar 4,77 persen.

Karakteristik pengangguran terbuka di DIY berdasarkan kelompok usia didominasi oleh angkatan kerja berusia muda, yakni pada kelompok usia 15-24 tahun. Proporsi dari kelompok ini mencapai 41,16 persen. Kondisi ini sangat tentu memprihatinkan, karena kelompok usia ini sebenarnya masih termasuk dalam kelompok usia sekolah dan seharusnya mereka masih ikut berpartisipasi dalam kegiatan belajar pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Pada umumnya, kelompok usia 15-24 tahun merupakan penduduk yang baru masuk dalam angkatan kerja. Kondisi ekonomi rumah tangga telah merubah status mereka dari partisipasi dalam sekolah menjadi angkatan kerja baru. Alasan utama bagi mereka untuk mencari pekerjaan adalah telah tamat

**Tabel 2.2.**  
**TPT menurut Wilayah, Jenis Kelamin, dan Karakteristik Individu (Persen) dan Jumlah Pengangguran Terbuka (Jiwa) di DIY, 2019**

		Wilayah		Jenis Kelamin		K+D	Jumlah Pengangguran	
		K	D	L	P		Jiwa	Persen
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kelompok Umur	15-24 Tahun	11,32	10,16	9,1	13,31	11,08	28.471	41,16
	25-34 Tahun	3,75	2,28	2,74	4,39	3,43	17.688	25,57
	35-44 Tahun	2,95	0,55	3,09	1,28	2,3	10.724	15,5
	45-54 Tahun	2,24	0,74	2,56	0,88	1,79	8.083	11,69
	55+ Tahun	1,33	0,04	1,35	0,22	0,82	4.204	6,08
Pendidikan Tertinggi	< SMA/SMK	2,65	0,69	2,4	1,2	1,83	17.784	25,71
	SMA/SMK	4,45	2,58	3,7	4,68	4,08	34.533	49,92
	> SMA/SMK	4,34	4,72	3,86	4,89	4,39	16.853	24,36
Hubungan dengan KRT	KRT	3,4	0,34	2,37	3,78	2,57	24.816	35,88
	Istri/Suami	1,29	0,32	0	0,97	0,97	5.465	7,9
	Anak/Menantu	6,69	4,05	5,11	7,28	6	33.874	48,97
	Lainnya	3,7	7,03	3,9	5,25	4,63	5.015	7,25
Status Kawin	Belum Kawin	8,09	9,18	6,65	10,81	8,27	37.562	54,3
	Kawin	2,31	0,45	2,05	1,31	1,73	27.032	39,08
	Cerai Hidup/Mati	3,42	0,33	3,93	1,88	2,48	4.576	6,62
<b>Total</b>			1,52	3,18	3,09	3,14	69.170	100

Sumber: diolah dari hasil Sakernas Bulan Agustus 2019, BPS DIY

sekolah atau sudah tidak mampu bersekolah lagi karena kondisi ekonomi dan dorongan untuk membantu ekonomi keluarga.

Secara relatif, perbandingan level TPT menurut kelompok usia terlihat semakin mengecil seiring dengan meningkatnya kelompok usia. TPT pada kelompok usia 15-24 tahun mencapai level tertinggi sebesar 11,08 persen. Sementara TPT pada kelompok usia lebih dari 55 tahun hanya sebesar 0,82 persen. Level TPT menurut kelompok usia di wilayah perkotaan dan perdesaan polanya hampir sama. Perbedaan yang cukup mencolok terlihat pada TPT kelompok usia 15-24 tahun menurut jenis kelamin. TPT perempuan berusia 15-24 tahun terlihat paling tinggi yakni 13,31 persen. Kelompok pengangguran berusia muda dan terutama berjenis kelamin perempuan harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah dengan memperluas kesempatan kerja bagi kelompok ini. Hal ini penting untuk mengurangi gap ketimpangan partisipasi angkatan kerja yang masih lebar antara laki-laki dan perempuan. Hambatan yang bersifat struktural maupun kultural bagi wanita usia muda untuk masuk dalam pasar tenaga kerja harus dikurangi dan dihilangkan.

Jumlah pengangguran menurut pendidikan tertinggi didominasi oleh mereka yang berpendidikan menengah yakni SMA/SMK sederajat dengan proporsi 49,92 persen. Pada umumnya, mereka adalah angkatan kerja baru. Alasan untuk mencari pekerjaan yang paling banyak dikemukakan oleh kelompok ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab untuk membantu ekonomi keluarga atau rumah tangga, karena sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan sekolah ke jenjang universitas. Secara relatif, level TPT yang paling tinggi terdapat pada kelompok yang berpendidikan lebih tinggi dari SMA/SMK atau universitas sebesar 4,39 persen dan diikuti oleh kelompok yang berpendidikan SMA/SMK sebesar 4,08 persen. Secara umum, perbandingan angka TPT tersebut menggambarkan adanya fenomena pengangguran terdidik di wilayah DIY.

Berdasarkan kajian literatur, ada beberapa penyebab tingginya pengangguran terdidik. Pertama, adanya ketidakcocokan antara karakteristik lulusan baru yang memasuki dunia kerja (sisi penawaran tenaga kerja) dengan kesempatan kerja yang tersedia (sisi permintaan tenaga kerja). Ketidakcocokan ini mencakup aspek geografis tempat tinggal, jenis pekerjaan, orientasi status, serta keahlian. Kedua, semakin terdidik seseorang, semakin besar harapannya pada jenis pekerjaan yang aman, sehingga lebih memilih bekerja pada perusahaan besar dibandingkan dengan berusaha sendiri. Ketiga, terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal, sementara angkatan kerja terdidik cenderung memilih sektor formal yang kurang berisiko. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam pasar tenaga kerja formal. Keempat, fungsi pasar tenaga kerja belum berjalan secara efisien yang ditandai oleh informasi tenaga kerja yang tidak sempurna serta adanya perilaku moral hazard, seperti suap dan nepotisme dalam perekrutan tenaga kerja.

Karakteristik pengangguran berdasarkan status hubungan dalam rumah tangga didominasi oleh mereka yang berstatus sebagai anak atau menantu dari kepala rumah tangga. Level TPT pada kelompok mencapai 6,0 persen pada kondisi Agustus 2019. Sementara, karakteristik pengangguran menurut status perkawinan didominasi oleh mereka yang statusnya belum kawin. Proporsi kelompok ini mencapai 54,3 persen.

Level TPT pada penduduk yang statusnya belum kawin tercatat cukup tinggi sebesar 8,27 persen. Berdasarkan uraian di atas, maka karakteristik individu dari pengangguran terbuka di wilayah DIY dicirikan oleh kelompok penduduk berusia muda (15-24 tahun), memiliki pendidikan tertinggi pada jenjang menengah (SMA/SMK), memiliki status hubungan sebagai anak/menantu dalam rumah tangga, serta berstatus belum kawin.

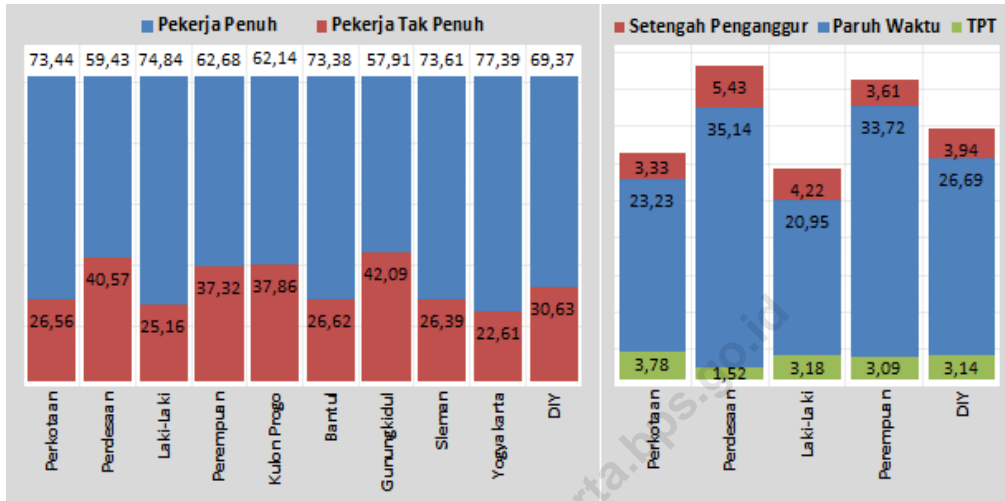
Berdasarkan wilayah kabupaten/kota di DIY, sebaran penduduk yang berstatus sebagai pengangguran terbuka pada kondisi Agustus 2019 sebagian besar terdapat di Kabupaten Sleman. Proporsinya mencapai 38,41 persen. Sebaran terbesar berikutnya adalah Bantul dan Kota Yogyakarta dengan proporsi masing-masing sebesar 25,59 persen dan 16,91 persen. Sementara, jumlah pengangguran di Kulon Progo tercatat paling sedikit yakni 6,67 persen. Posisi sebaran ini cukup sejalan dengan komposisi jumlah penduduk menurut kabupaten/kota di DIY, kecuali di Kota Yogyakarta. Berdasarkan level TPT, Kota Yogyakarta tercatat selalu memiliki TPT tertinggi. Pada bulan Agustus 2019, TPT Kota Yogyakarta mencapai 4,80 persen. TPT tertinggi berikutnya terjadi di Sleman dan Bantul masing-masing sebesar 3,93 persen dan 3,06 persen. Sementara, TPT terendah terjadi di Kulon Progo dan Gunungkidul masing-masing sebesar 1,80 persen dan 1,92 persen. Kondisi level dan sebaran pengangguran terbuka ini sangat dipengaruhi oleh aspek geografi ekonomi maupun karakteristik individu pekerja. Kesempatan kerja formal sebagian besar terdapat di wilayah yang menjadi pusat ekonomi DIY khususnya Kota Yogyakarta dan Sleman, sehingga terjadi mobilitas angkatan kerja dari daerah sekitar menuju ke pusat-pusat kegiatan ekonomi untuk mencari pekerjaan. Ketidakseimbangan antara jumlah kesempatan kerja formal dan jumlah pencari kerja mendorong tingginya pengangguran terbuka di wilayah Kota Yogyakarta dan Sleman.

#### **d. Komposisi Pekerja Tak Penuh menurut Jenis Kelamin dan Wilayah**

Beberapa indikator ketenagakerjaan yang dapat disajikan berdasarkan hasil Sakernas pada kondisi Agustus 2019 diringkas dalam Gambar 4. Komposisi pekerja penuh di DIY mencapai 69,37 persen dan 30,63 sisanya merupakan pekerja tak penuh (jam kerja < 35 jam seminggu). Masih besarnya komposisi pekerja tak penuh menjadi salah satu penjelasan relatif rendahnya rata-rata produktivitas tenaga kerja di DIY dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi. Meskipun dari sisi TPT relatif rendah atau hanya 3,14 persen, ternyata komposisi pekerja tak penuh juga cukup besar. Bahkan, hampir 4 persen dari total penduduk bekerja di DIY berstatus sebagai setengah penganggur. Artinya, mereka adalah kelompok yang bekerja di bawah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau masih mau menerima jika ada tawaran pekerjaan.

Secara umum, proporsi pekerja tak penuh di kawasan perdesaan terlihat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan, meskipun dari sisi TPT di wilayah perdesaan lebih rendah. Hal ini cukup berpengaruh terhadap perbedaan produktivitas antara pekerja di perkotaan dan perdesaan, karena salah satu yang berpengaruh terhadap produktivitas selain keterampilan adalah jumlah jam kerja. Sementara, proporsi pekerja tak penuh perempuan terlihat lebih tinggi dari laki-laki. Artinya, kesempatan kerja formal dengan jumlah jam kerja 35 jam atau lebih dalam seminggu lebih banyak diisi oleh kaum laki-laki. Hal ini berpengaruh terhadap perbedaan produktivitas antara laki-laki dan perempuan,

**Gambar 2.4.**  
**Proporsi Pekerja Penuh, Pekerja tak Penuh, Setengah Penganggur, Pekerja Paruh Waktu, dan TPT menurut Wilayah dan Jenis Kelamin di DIY, 2019 (Persen)**



Sumber: diolah dari data Sakernas bulan Agustus 2019, BPS Provinsi DIY

meskipun dari sisi TPT tidak ada perbedaan yang signifikan. Berdasarkan kabupaten/kota, proporsi pekerja tak penuh terbesar terdapat di Gunungkidul dan Kulon Progo yang utamanya bekerja pada sektor primer atau pertanian. Sebaliknya, proporsi pekerja tak penuh terkecil terdapat di Kota Yogyakarta. Hal ini menjadi penjabar perbedaan rata-rata produktivitas pekerja yang cukup lebar antara Kota Yogyakarta dan Gunungkidul serta Kulon Progo, meskipun level TPT di Gunungkidul dan Kulon Progo tercatat lebih rendah. Mayoritas pekerjaan formal dengan jumlah jam kerja yang cukup terdapat di wilayah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi di Kota Yogyakarta dan Sleman.

## e. Karakteristik Setengah Pengangguran dan Pekerja Paruh Waktu

Komposisi pekerja tak penuh dapat dirinci menjadi dua kelompok, yakni setengah pengangguran (under unemployment) dan pekerja paruh waktu (part time worker). Pada kondisi Agustus 2019, proporsi setengah pengangguran mencapai 3,94 persen terhadap total penduduk bekerja di DIY. Mereka adalah penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau mau menerima tawaran pekerjaan. Proporsi pekerja paruh waktu mencapai 26,69 persen dari total penduduk bekerja di DIY. Mereka adalah penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal dan tidak mencari pekerjaan atau tidak mau menerima tawaran pekerjaan atau disebut setengah pengangguran sukarela.

Secara umum, tingkat setengah pengangguran maupun pekerja paruh waktu di wilayah perkotaan lebih rendah dari perdesaan, meskipun dari sisi TPT perkotaan

lebih tinggi dari perdesaan. Perbedaan yang cukup signifikan ini sangat terkait dengan karakteristik jenis pekerjaan yang terdapat di kedua wilayah. Jenis pekerjaan formal dengan jam kerja penuh lebih banyak tersedia di wilayah perkotaan. Sementara, di wilayah perdesaan kesempatan kerja formal relatif terbatas dan yang tersedia cukup banyak adalah pekerjaan non formal yang berbasis pertanian. Pekerjaan di sektor pertanian umumnya bersifat musiman dengan jumlah jam kerja yang fleksibel tergantung kebutuhan dan banyak pekerja yang statusnya hanya pekerja keluarga.

Karakteristik individu pekerja yang termasuk dalam setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu di wilayah DIY secara ringkas disajikan dalam Tabel 3. Tingkat

**Tabel 2.3.**  
**Level dan Komposisi Tingkat Setengah Pengangguran dan Pekerja Paruh Waktu menurut Wilayah dan Karakteristik Individu di DIY, Agustus 2019 (Persen)**

		Perkotaan		Perdesaan		K+D		Komposisi (%) *)	
		<i>Under Unemp.</i>	<i>Part Time</i>	<i>Under Unemp.</i>	<i>Part Time</i>	<i>Under Unemp.</i>	<i>Part Time</i>	<i>Under Unemp.</i>	<i>Part Time</i>
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jenis Kelamin	Laki-laki	3,49	18,89	6,10	26,28	4,22	20,95	58,87	43,20
	Perempuan	3,14	28,75	4,68	45,05	3,61	33,72	41,13	56,80
Kelompok Umur	15-24 Tahun	3,76	20,89	9,98	22,10	5,03	21,13	13,65	8,47
	25-34 Tahun	2,82	14,40	7,68	21,84	3,89	16,04	23,01	14,03
	35-44 Tahun	3,08	19,85	6,05	31,79	3,90	23,16	21,15	18,54
	45-54 Tahun	4,26	22,06	6,41	32,13	4,91	25,11	25,89	19,55
	55+ Tahun	3,07	40,65	2,13	49,43	2,70	44,14	16,30	39,41
Pendidikan Tertinggi	< SMA/SMK	4,00	32,84	4,86	41,86	4,37	36,69	49,61	61,56
	SMA/SMK	3,64	18,49	7,00	24,99	4,31	19,79	41,59	28,20
	> SMA/SMK	1,56	16,32	4,95	13,14	2,02	15,89	8,80	10,24
Status Kawin	Belum Kawin	3,92	17,12	15,00	17,47	5,80	17,18	28,72	12,56
	Kawin	3,09	24,18	4,31	36,20	3,48	28,03	63,62	75,69
	Cerai Hidup/Mati	3,75	32,25	3,21	48,16	3,58	37,20	7,66	11,76
Lapangan Usaha	Pertanian	8,11	58,86	7,40	51,54	7,68	54,45	38,51	40,31
	Industri	2,94	17,34	4,66	25,86	3,45	19,88	21,14	17,98
	Jasa-jasa	2,67	19,34	3,62	22,18	2,84	19,84	40,36	41,71
Status dalam Pekerjaan	Berusaha Sendiri	3,98	33,35	4,68	43,18	4,20	36,47	39,47	50,63
	Buruh/Karyawan	1,86	10,24	2,55	13,89	2,00	10,97	22,46	18,19
	Pekerja Bebas	6,83	43,12	9,49	46,25	8,03	44,53	38,07	31,18
<b>Total</b>		<b>3,33</b>	<b>23,23</b>	<b>5,43</b>	<b>35,14</b>	<b>3,94</b>	<b>26,69</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Keterangan: \*) Komposisi merupakan share (%) menurut karakteristik

Sumber: diolah dari Sakernas Agustus 2019, BPS DIY



setengah pengangguran tertinggi menurut jenis kelamin di DIY dimiliki oleh pekerja laki-laki sebesar 4,22 persen. Sebaliknya, proporsi pekerja paruh waktu perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Secara umum, kondisi ini menggambarkan bahwa laki-laki yang bekerja kurang dari jam kerja normal memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mencari pekerjaan lain atau mau menerima jika ada tawaran pekerjaan dibandingkan dengan kaum perempuan. Sebaliknya, perempuan yang statusnya bekerja kurang dari jam kerja normal memiliki kecenderungan untuk tetap bertahan dengan kondisi pekerjaan yang ada atau secara sukarela mereka tidak mencari pekerjaan lain atau tidak mau menerima jika ada tawaran pekerjaan. Kondisi ini sangat terkait dengan banyak faktor. Salah satunya adalah pandangan dalam masyarakat Jawa yang menempatkan wanita sebagai penanggung jawab pekerjaan domestik mengurus rumah tangga. Tentu menjadi sangat berat dengan status bekerja ditambah dengan beban mengerjakan pekerjaan domestik. Akibatnya, kebanyakan perempuan yang telah bekerja cenderung tidak mencari pekerjaan lain atau tidak akan menerima jika ada tawaran pekerjaan, meskipun jam kerja yang harus dijalani kurang dari jam kerja normal.

Berdasarkan usia, proporsi setengah pengangguran tertinggi terdapat pada kelompok usia 15-24 tahun (5,03 persen). Fakta ini semakin menambah keyakinan, bahwa persoalan pengangguran yang paling penting untuk segera ditangani adalah pengangguran pada kelompok usia muda atau 15-24 tahun. Alasannya adalah level TPT yang tertinggi juga terdapat pada kelompok usia ini (11,08 persen). Usia 15-24 tahun menjadi kelompok paling rentan untuk keluar dan masuk dalam pasar tenaga kerja dengan tujuan mencari jenis pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan tingkat upah yang diharapkan. Masih banyak dia antara mereka yang hanya mencoba suatu jenis pekerjaan. Jika cocok atau sesuai akan terus dilanjutkan dan jika tidak cocok akan mencari jenis pekerjaan lain. Sementara, proporsi pekerja paruh waktu tertinggi terdapat pada kelompok usia paling tua yakni 55 tahun ke atas (44,14 persen). Semakin bertambah usia pekerja, maka ada kecenderungan bagi mereka untuk secara sukarela menerima kondisi pekerjaan yang sedang dijalannya. Mereka cenderung tidak melakukan upaya mencari kerja, karena proses mencari kerja sangat rumit, menyita banyak waktu, dan sering terbentur oleh aturan struktural seperti pembatasan usia dan kualifikasi pendidikan untuk jenis pekerjaan tertentu.

Tingkat setengah pengangguran tertinggi menurut karakteristik pendidikan tercatat pada kelompok pekerja berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 4,37 persen. Kelompok ini menjadi representasi pekerja yang kurang terdidik. Level pekerja paruh waktu tertinggi juga terdapat pada kelompok ini yakni sebesar 36,69 persen. Jadi, meskipun level TPT kelompok ini rendah (1,83 persen) tingkat setengah penganggur dan proporsi pekerja paruh waktu tercatat paling tinggi. Mereka banyak mengisi kesempatan kerja informal di perkotaan maupun perdesaan. Sebaliknya, meskipun level TPT pada kelompok pekerja terdidik (berpendidikan SMA ke atas) tinggi, tingkat setengah pengangguran maupun proporsi pekerja paruh waktunya relatif lebih rendah.

Setengah penganggur tertinggi menurut karakteristik perkawinan terdapat pada kelompok penduduk yang berstatus belum kawin sebesar 5,80 persen. Sebaliknya,

proporsi pekerja paruh waktu yang tertinggi terdapat pada kelompok yang statusnya cerai hidup/mati sebesar 37,20 persen. Kelompok pekerja yang statusnya belum kawin sebagian besar masih berusia muda dan termasuk dalam kelompok usia 15-24 tahun. Cukup beralasan jika level TPT dan tingkat setengah pengangguran pada kelompok pekerja belum kawin juga paling tinggi karena memiliki irisan yang kuat dengan kelompok pekerja muda. Sementara, kelompok pekerja yang statusnya cerai hidup atau cerai mati memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk tetap bertahan dalam pekerjaan yang sedang dijalani tanpa ada upaya untuk mencari pekerjaan lain dibandingkan dengan status perkawinan yang lainnya.

Tingkat setengah pengangguran yang tertinggi menurut karakteristik lapangan usaha di DIY terdapat pada sektor pertanian sebesar 7,68 persen. Proporsi pekerja paruh waktu yang tertinggi juga terdapat pada sektor ini, yakni sebesar 54,45 persen. Sektor pertanian masih menjadi tumpuan akhir bagi penduduk yang tidak tertampung oleh sektor yang lainnya untuk bekerja. Bagi pekerja yang telah berusia tua dan menguasai lahan pertanian, mereka akan tetap bekerja di sektor ini dan tidak melakukan upaya untuk mencari pekerjaan lain meskipun jam kerjanya kurang dari jam kerja normal. Namun, bagi mereka yang masih berusia muda keberadaan mereka di sektor pertanian dengan jumlah jam kerja terbatas sifatnya hanya untuk sementara, sambil mencari pekerjaan lain yang sesuai dengan harapan.

Tingkat setengah pengangguran tertinggi menurut status dalam pekerjaan utama terdapat pada kelompok pekerja bebas sebesar 8,03 persen. Pada umumnya, pekerja bebas baik di sektor pertanian maupun non pertanian merupakan jenis pekerja informal yang relatif mudah untuk masuk dan keluar. Kebanyakan pekerja yang statusnya pekerja bebas adalah mereka yang tidak tertampung dalam sektor formal. Mereka terpaksa bekerja di sektor informal secara lepas atau tidak terikat dan memiliki jam kerja terbatas sambil berupaya mencari pekerjaan lain yang dianggap sesuai. Kebanyakan di antara mereka juga akan menerima jika ada tawaran pekerjaan. Proporsi pekerja paruh waktu terbesar juga terdapat pada kelompok pekerja bebas, yakni sebesar 44,53 persen. Mereka pada umumnya adalah pekerja yang telah berusia tua yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan tetap, sehingga secara sukarela tetap menjalani statusnya sebagai pekerja bebas di sektor pertanian sebagai buruh tani atau di sektor non pertanian sebagai buruh bangunan atau pekerja serabutan.

## 6. Kesimpulan

1. Dinamika perkembangan TPT di wilayah DIY sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian makro, terutama stabilitas pertumbuhan ekonomi. Ketika perekonomian mampu tumbuh stabil di atas 5 persen TPT akan mengikuti pada kisaran 3-4 persen dan ketika perekonomian tumbuh di bawah 5 persen maka level TPT akan meningkat di atas 4 persen.
2. Pola perkembangan TPT menurut wilayah perkotaan dan perdesaan DIY berjalan hampir searah. Namun, terdapat selisih perbedaan yang nyata secara statistik yakni TPT di wilayah perkotaan selalu lebih tinggi dari TPT di wilayah perdesaan.

Pola perkembangan TPT menurut jenis kelamin di DIY berjalan hampir searah dan tidak terdapat gap perbedaan yang nyata antara level TPT laki-laki dan perempuan.

3. Karakteristik pengangguran terbuka di DIY dicirikan oleh penganggur yang berusia muda (15-24 tahun), berpendidikan SMA/SMK ke atas, berstatus belum kawin, memiliki hubungan sebagai anak/menantu dalam rumah tangga.

Komposisi pekerja tak penuh yang cukup besar menjadi penjas relatif rendahnya produktivitas tenaga kerja di DIY dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa.

Tingkat setengah penganggur dan pekerja paruh waktu di perkotaan lebih rendah dari perdesaan, meskipun TPT perkotaan lebih tinggi. Penyebabnya adalah karakteristik jenis pekerjaan formal dan purna waktu lebih banyak terdapat di perkotaan serta mobilitas angkatan kerja muda dan terdidik.

Karakteristik setengah penganggur di DIY adalah penduduk laki-laki, berusia muda, pendidikan SMA/SMK ke bawah, berstatus belum kawin, bekerja di sektor primer (pertanian), dan status pekerjaannya adalah pekerja bebas.

Karakteristik pekerja paruh waktu di DIY adalah penduduk wanita, berusia tua, pendidikan kurang dari SMA/SMK, berstatus belum kawin dan cerai hidup/mati, bekerja di sektor primer (pertanian), dan status pekerjaannya adalah pekerja bebas.

## 7. Saran dan Rekomendasi

1. Sangat penting untuk bisa menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi DIY di atas 5 persen agar TPT tetap terkendali di bawah 4 persen.
2. Memperluas kesempatan kerja baru melalui aktivitas investasi dan pembangunan yang berbasis kawasan perdesaan dan pinggiran agar migrasi angkatan kerja muda dan terdidik dari perdesaan ke wilayah perkotaan semakin berkurang. Hal ini akan mengurangi potensi meningkatnya TPT di perkotaan serta setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu di perdesaan.
3. Perluasan kesempatan kerja baru harus memperhatikan aspek karakteristik penganggur terbuka di DIY yakni untuk angkatan kerja berusia muda, terdidik (pendidikan SMA/SMK ke atas), dan statusnya belum kawin.
4. Perlu upaya untuk lebih menggali dan mengembangkan potensi ekonomi lokal yang berbasis pariwisata yang mampu mendorong terciptanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang bersifat formal dan purna waktu khususnya di wilayah perdesaan untuk mengurangi tingginya setengah pengangguran khususnya di wilayah perdesaan.

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Jl. Lingkar Selatan (Jl. Brawijaya) Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta  
Telp. (0274) 4342234 (Hunting) Fax. (0274) 4342230  
Homepage: <http://yogyakarta.bps.go.id> Email: [bps3400@mailhost.bps.go.id](mailto:bps3400@mailhost.bps.go.id)

ISBN 978-602-1392-96-6

